

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II TAHUN 2025

Balai Besar POM di Mataram

KATA PENGANTAR



Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt
Kepala Balai Besar POM di Mataram

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan II

tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) pada Triwulan II tahun 2025.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tertuang perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Mataram Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2025 serta membandingkan antara realisasi kinerja Triwulan II terhadap target tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja Triwulan II merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2025, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram pada triwulan berikutnya.

Mataram, 21 Juli 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Mataram,



The image shows a circular official stamp of the Badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) in Mataram. The stamp is purple and contains the text "BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN" around the top edge and "DI MATARAM" around the bottom edge. In the center, there is a logo with a stylized bird and the text "BADAN POM". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Mataram Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian Sasaran Kegiatan yang didasarkan pada Perjanjian Kerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kerja Tahun 2025 yang mengacu pada Draft Renstra BBPOM di Mataram Tahun 2025-2029. Terdapat 22 kegiatan utama (RO) untuk menunjang pencapaian 9 sasaran kegiatan dan 25 indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Pada Triwulan II tahun 2025 hanya 7 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja yang diukur capaiannya.

Dari 6 sasaran kegiatan yang diukur capaiannya di Triwulan II tahun 2025 diperoleh 4 sasaran kegiatan dengan kategori “sangat baik”, 1 sasaran kegiatan dengan kategori “baik” dan 1 sasaran kegiatan dengan kategori “cukup”. Nilai Kinerja Organisasi atau Nilai Pencapaian Sasaran kegiatan (NPSS) diperoleh sebesar 103,95% dengan predikat “ISTIMEWA”.

Hasil capaian tiap sasaran kegiatan di Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Nilai Sasaran Kegiatan pada Sasaran Kegiatan pertama “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar 109,98% dengan kategori SANGAT BAIK, menunjukkan BBPOM di Mataram sangat efektif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya;
- Nilai Sasaran Kegiatan pada Sasaran Kegiatan ketiga “Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar 103,58% dengan kategori SANGAT BAIK, menunjukkan BBPOM di Mataram sangat efektif dalam penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya;
- Nilai Sasaran Kegiatan pada Sasaran Kegiatan keempat “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” sebesar 101,80% dengan kategori SANGAT BAIK menunjukkan BBPOM di Mataram sangat efektif dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) di wilayah kerjanya;
- Nilai Sasaran Kegiatan pada Sasaran Kegiatan kelima “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” sebesar 77,78% dengan

kategori CUKUP menunjukkan BBPOM di Mataram belum efektif dalam meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu;

- Nilai Sasaran Kegiatan pada Sasaran Kegiatan keenam “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” sebesar 100,73% dengan kategori SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan keberhasilan BBPOM di Mataram dalam melaksanakan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerjanya;
- Capaian indikator Sasaran Kegiatan ketujuh “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” sebesar 100,0% dengan kategori BAIK, menunjukkan BBPOM di Mataram berhasil dalam melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerjanya.

Untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan di Triwulan II tahun 2025 dilakukan pengukuran terhadap 15 indikator kinerja (IKSK) dari 6 sasaran kegiatan. Terdapat 4 indikator yang capaiannya dengan kategori “sangat baik”, 4 indikator dengan kategori “baik”, 1 indikator dengan kategori “cukup”, serta 6 indikator dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Mataram di Triwulan II tahun 2025 antara 77,78% sampai dengan 133,33%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” dan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, BBPOM di Mataram didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 DIPA awal sebesar Rp. 20,815,994,000, bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2025 nomor SP DIPA- 063.01.2.432960/2025 tanggal 2 Desember 2024. Pada Triwulan II tahun 2024 dilakukan efisiensi/blokir anggaran sebesar Rp.6.579.247.000 atau sebesar 31,61% dari total anggaran. Anggaran yang diblokir berasal dari jenis belanja barang (58,28% dari belanja barang) dan belanja modal (6,31% dari belanja modal).

Realisasi anggaran di Triwulan II tahun 2025 adalah Rp. 4,307,855,209 atau sebesar 20,69% (terhadap seluruh pagu anggaran) atau 30,26% (terhadap pagu anggaran dikurangi blokir).

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

Sumbangan terbesar terhadap realisasi anggaran ini yaitu realisasi belanja modal (45,99%) dan belanja pegawai (25,90%).

Balai Besar POM di Mataram berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya sehingga diharapkan seluruh Sasaran Kegiatan pada akhir tahun 2025 dapat tercapai.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR TABEL	8
BAB I. PENDAHULUAN	11
I.1 LATAR BELAKANG	11
I.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	11
I.3 STRUKTUR ORGANISASI	13
I.4 ISU STRATEGIS	14
I.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	27
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	32
II. 1 RENCANA STRATEGIS	32
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	46
III.1 Capaian Kinerja Organisasi	46
III.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	138
III.3. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja	160
III.4 Realisasi Anggaran	160
BAB IV. PENUTUP.....	174
IV.1. Kesimpulan	174
IV.2. Saran	176
LAMPIRAN.....	177

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Empat Inti Kegiatan Fungsi BBOM di Mataram	12
Gambar 1. 2 Wilayah Kerja BBOM di Mataram	13
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Mataram.....	14
Gambar 1. 4 Peta Wilayah UPT BPOM di Provinsi NTB	30
Gambar 1. 5 Grafik Sarana Produksi di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2024	31
Gambar 1. 6 Grafik Sarana Distribusi di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2024	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Kebutuhan SDM BBPOM di Mataram Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2024	27
Tabel 2. 1 Matriks Target Kinerja pada Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Dokumen Draft Renstra BBPOM di Mataram Tahun 2025	35
Tabel 2. 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	38
Tabel 3. 1 Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dan Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2025	47
Tabel 3. 2 Target, realisasi dan capaian IKSK Balai Besar POM di Mataram sampai dengan Triwulan II tahun 2025	49
Tabel 3. 3 Target, realisasi dan %capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60
Tabel 3. 4 Target, realisasi dan %capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	66
Tabel 3. 5 Target, realisasi dan %capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	69
Tabel 3. 6 Target, realisasi dan %capaian Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	73
Tabel 3. 7 Target, realisasi dan %capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	76
Tabel 3. 8 Rincian keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	77
Tabel 3. 9 Target, realisasi dan %capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
Tabel 3. 10 Target, realisasi dan %capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84

Tabel 3. 11 Target, realisasi dan %capaian Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	88
Tabel 3. 12 Target, realisasi dan %capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
Tabel 3. 13 Target, realisasi dan %capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95
Tabel 3. 14 Target, realisasi dan %capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98
Tabel 3. 15 Target, realisasi dan %capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
Tabel 3. 16 Target, realisasi dan %capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106
Tabel 3. 17 Target dan realisasi serta capaian Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman.....	109
Tabel 3. 18 Realisasi progress Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman.....	109
Tabel 3. 19 Target dan progress realisasi Jumlah desa pangan aman	113
Tabel 3. 20 Realisasi progress Jumlah desa pangan aman	113
Tabel 3. 21 Target dan Progres Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas.....	116
Tabel 3. 22 Realisasi progress Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	116
Tabel 3. 23 Target, realisasi dan %capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	121
Tabel 3. 24 Target, realisasi dan %capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	122
Tabel 3. 25 Target, realisasi dan %capaian Persentase keberhasilan Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.....	125

Tabel 3. 26 Target dan realisasi perkara serta keberhasilan penyidikan Triwulan II tahun 2025.....	125
Tabel 3. 27 Target dan realisasi perkara serta keberhasilan penyidikan Triwulan II tahun 2025.....	129
Tabel 3. 28 Target dan realisasi perkara serta keberhasilan penyidikan Triwulan II tahun 2025.....	132
Tabel 3. 29 Realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja Triwulan II tahun 2025	161
Tabel 3. 30 Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis BBPOM di Mataram sampai Triwulan II tahun 2025.....	161
Tabel 3. 31 Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran masing-masing kegiatan (Rincian Output) sampai Triwulan II Tahun 2025	165
Tabel 3. 32 Tingkat Efisiensi Kegiatan Realisasi TW I terhadap Pagu Tahunan.....	168
Tabel 3. 33 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran kegiatan berdasarkan Target Indikator yang ditetapkan Triwulan II dan realisasi pada Triwulan II	170

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi serta mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program kerja.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

BBPOM di Mataram sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap triwulan dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Interim BBPOM di Mataram Triwulan II tahun 2025 merujuk kepada Rencana Strategis BBPOM di Mataram tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram tahun 2025.

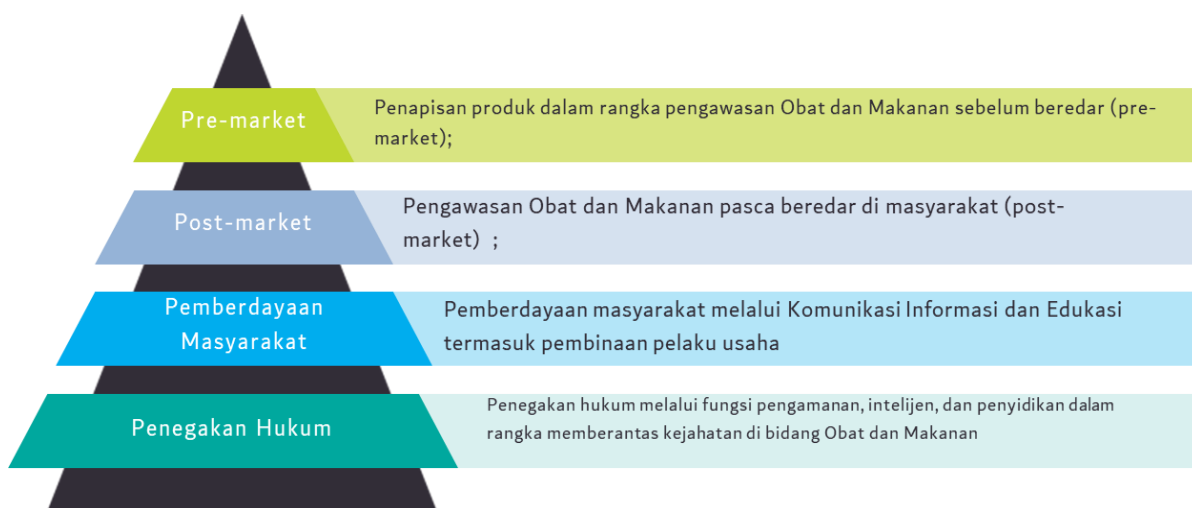
I.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

BBPOM di Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai peraturan tersebut UPT BPOM diklasifikasikan menjadi 23 (dua puluh tiga) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, 30 (tiga puluh) Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan 23 (dua puluh tiga) Loka Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan PerUndang-Undangan (UU) yang menjadi landasan teknis tugas dan fungsi BBPOM di Mataram antara lain (i) UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika; (ii) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (iii) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (iv) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; (v) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (vi) Undang-undang

nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (vii); PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi; (viii) PP Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian; (ix) PP Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;(x) PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan; (xi) PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (xii) PP Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan; dan (xiii) PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

BBPOM di Mataram secara garis besar memiliki empat inti kegiatan dilihat dari fungsinya, yaitu:



Gambar 1. 1 Empat Inti Kegiatan Fungsi BBOM di Mataram

BBPOM di Mataram sebagai UPT Badan POM memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram antara lain:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

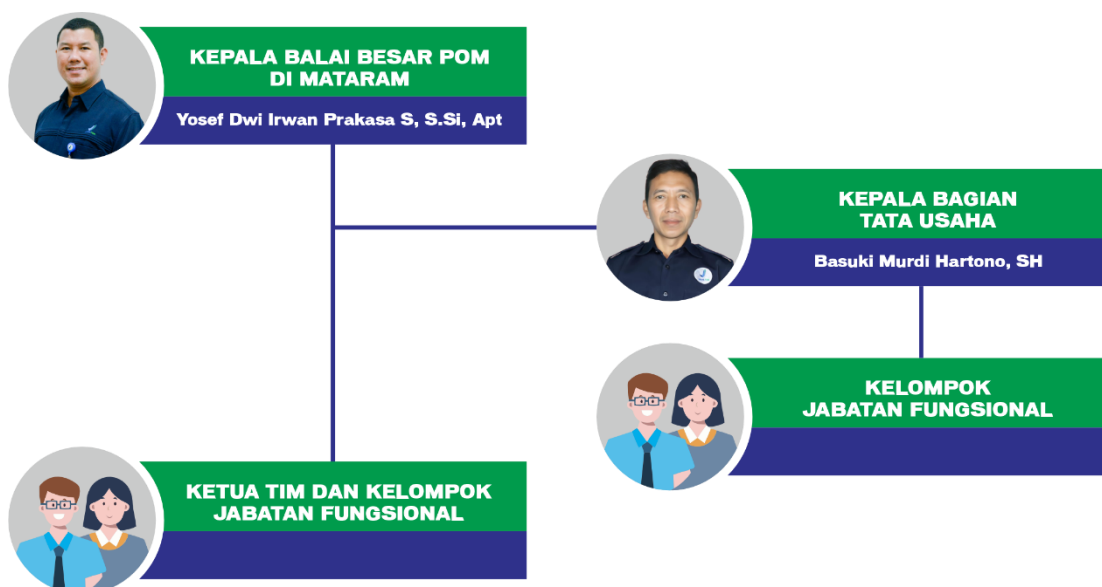
- Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan



Gambar 1. 2 Wilayah Kerja BBOM di Mataram

I.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Mataram disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Mataram telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut saat ini struktur organisasi hanya terdiri dari Kepala, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Mataram

I.4 ISU STRATEGIS

IMPLEMENTASI INPRES No. 3 TAHUN 2017

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 bahwa Badan POM sebagai Koordinator Pengawasan Obat dan Makanan Nasional dan guna mendukung implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/6206/SJ tanggal 22 September 2022 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Salah satu langkah konkrit dalam implementasi Inpres No.3 Tahun 2017 yang telah dilaksanakan yaitu melalui penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) yang telah diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sejak



tahun 2020. Pada tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil menempati peringkat ke-4 secara nasional dalam realisasi anggaran (93,09%) dan capaian output (93,75%) dari DAK NF BOK POM Tahun Anggaran 2024. Prestasi ini meningkat dari

tahun 2023 sebagai peringkat ke-8 secara nasional dalam realisasi anggran dan capaian output dari DAK NF BOK POM Tahun Anggaran 2023.

Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah. TKPPOM bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai jenis produk, termasuk obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, serta bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM). Hingga tahun 2023 terdapat 3 (tiga) kabupaten yang memiliki SK TKPPOM yang telah sesuai dengan SE Mendagri No 700/6206/SJ yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat.

Keberlanjutan koordinasi yang solid antara BPOM, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan. Pelaksanaan TKPPOM yang efektif tidak hanya berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pengawasan, tetapi juga mendukung kesehatan masyarakat dan keamanan pangan di daerah.

KASUS STUNTING DI NTB



Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, kurangnya stimulasi psikososial, serta paparan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan standar usianya. Selain

berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal, stunting juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, menghambat perkembangan kecerdasan, dan mempengaruhi potensi produktivitas di masa depan. Dari sisi ekonomi, stunting berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dengan target nasional prevalensi stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024. Terdapat 12 provinsi prioritas dalam penanganan stunting, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama dengan Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatra Utara.

Berdasarkan data terbaru, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencapai penurunan signifikan dalam prevalensi stunting. Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan RI bersama BPKP (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan) tahun 2023 menunjukkan angka stunting sebesar 24,6 persen, menurun 8,1 persen dibanding data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.

Sebagai salah satu upaya mendukung percepatan penurunan angka stunting, BBPOM di Mataram memiliki peran strategis dalam pengawasan dan intervensi keamanan pangan yang dapat berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada perbaikan gizi masyarakat. Program yang telah dijalankan antara lain:

- 1. Pengawasan Pangan Fortifikasi**

BBPOM di Mataram melakukan pengambilan sampel dan pengujian pangan fortifikasi serta pendampingan pelaku usaha untuk memastikan produk pangan yang beredar telah memenuhi standar gizi yang aman dan sesuai dengan regulasi.

- 2. Intervensi Keamanan Pangan di Desa (Desa Pangan Aman)**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di pedesaan terkait pentingnya keamanan pangan melalui edukasi dan penguatan sistem keamanan pangan berbasis komunitas.

- 3. Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA)**

Germas SAPA menjadi salah satu bentuk kampanye edukasi yang melibatkan masyarakat luas dalam memahami dan menerapkan pola konsumsi pangan yang aman dan bergizi.

4. Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Program ini dirancang untuk memastikan keamanan jajanan anak sekolah dengan melakukan pengawasan, edukasi kepada sekolah, dan intervensi agar anak-anak mendapatkan pangan yang sehat dan bergizi selama berada di lingkungan sekolah.

5. Dukungan ISPS

Intervensi Serentak Pencegahan Stunting (ISPS) Tahun 2024 adalah gerakan nasional yang dilakukan secara terpadu untuk menekan angka stunting di Indonesia. ISPS melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta instansi terkait, dengan tujuan meningkatkan cakupan layanan kesehatan bagi kelompok sasaran utama, yaitu calon pengantin, ibu hamil, dan balita. Kegiatan ISPS mencakup pendataan, pendampingan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi, serta intervensi spesifik dan sensitif untuk memastikan tumbuh kembang anak yang optimal dan mencegah stunting sejak dini. Sebagai bentuk dukungan terhadap ISPS, BBPOM di Mataram berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya keamanan pangan dan obat yang dikonsumsi. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan di Posyandu Keluarga Tulip, Kelurahan Monjok, Kota Mataram. Melalui kegiatan ini, BBPOM di Mataram turut mendorong peningkatan kunjungan Posyandu, memberikan pemahaman mengenai pangan aman dan bergizi, serta membagikan paket pencegahan stunting bagi peserta Posyandu. Tak hanya di Kota Mataram, BBPOM juga mendukung pelaksanaan ISPS di Kabupaten Lombok Barat dengan melakukan edukasi dan intervensi kepada calon pengantin, ibu hamil, dan balita. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat, konsumsi pangan bergizi, serta penggunaan obat yang aman demi mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN) DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah kerangka pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan secara terpadu oleh seluruh komponen bangsa Indonesia dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Salah satu subsistem penting dalam SKN adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang mencakup berbagai upaya untuk memastikan:

1. Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk: Menjamin aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar di masyarakat.
2. Ketersediaan dan Pemerataan Obat: Memastikan obat esensial tersedia secara merata dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Perlindungan Masyarakat: Mencegah penggunaan yang salah serta penyalahgunaan obat dengan mengedepankan penggunaan obat yang rasional.
4. Kemandirian di Bidang Kefarmasian: Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dalam produksi farmasi dan alat kesehatan.

Sementara itu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan setiap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Program ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dalam pelaksanaan JKN, terdapat penjaminan mutu obat sebagai bagian integral dalam pembangunan kesehatan. Dampak implementasi SKN dan JKN terhadap pengawasan obat dan makanan dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Dampak Langsung:

Implementasi JKN mendorong peningkatan jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari industri farmasi domestik maupun luar negeri, karena para produsen berlomba untuk menjadi pemasok dalam program pemerintah tersebut.

2. Dampak Tidak Langsung:

Adanya peningkatan konsumsi obat, baik dari segi jumlah maupun jenisnya, yang dapat mempengaruhi kualitas serta keamanan produk farmasi yang beredar di masyarakat. Selain itu, besarnya kebutuhan obat dalam JKN berpotensi menyebabkan overcapacity di industri farmasi yang dapat memengaruhi konsistensi mutu produk.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak tersebut, Balai Besar POM di Mataram berperan aktif dalam pengawasan produk obat JKN melalui berbagai upaya, antara lain:

- Inspeksi Sarana Distribusi Sediaan Farmasi: Melakukan pengawasan terhadap fasilitas distribusi farmasi guna memastikan obat yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.
- Sampling dan Pengujian Laboratorium: Mengambil sampel dan menguji obat-obat publik di berbagai fasilitas kesehatan seperti gudang farmasi kabupaten/kota, puskesmas, rumah sakit, serta sarana pelayanan kesehatan lainnya untuk memastikan mutu produk yang dikonsumsi masyarakat.

Peran pengawasan yang efektif sangat penting guna memastikan bahwa obat yang didistribusikan dalam program JKN aman, efektif, dan berkualitas, sekaligus mendukung tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan sesuai dengan amanat SKN dan JKN.

PERUBAHAN IKLIM (*CLIMATE CHANGE*)

Perubahan iklim merupakan salah satu isu global yang menjadi ancaman serius bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti emisi gas rumah kaca dan aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Dampaknya dapat dirasakan pada berbagai sektor, seperti pertanian, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah komprehensif yang melibatkan pengendalian, penanggulangan, serta adaptasi agar dampak yang lebih buruk dapat dihindari.

Balai Besar POM di Mataram turut berperan dalam mendukung BPOM Net Zero Carbon Programme melalui penggunaan lampu sensor gerak hemat energi, penghijauan di sekitar halaman kantor, pengolahan kompos, pemisahan sampah organik dan anorganik. Langkah ini dipilih sebagai upaya efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon dalam operasional kantor, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang diusung BPOM. Selain itu Laboratorium Balai Besar POM di Mataram juga memperoleh predikat Green Laboratory berdasarkan penilaian dari P3OMN.

BPOM juga terus mendorong industri pangan untuk memilah limbah sampah organik dan anorganik serta menggunakan kemasan pangan ramah lingkungan yang terbuat dari bahan yang mudah terurai, dapat didaur ulang dan aman bagi lingkungan dan manusia. Upaya ini penting untuk mengurangi limbah plastik yang dapat mencemari ekosistem darat maupun laut.



Dengan langkah-langkah ini, BBPOM di Mataram berkomitmen untuk turut mendukung mitigasi perubahan iklim sekaligus menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat melalui pengawasan produk obat dan makanan yang berwawasan lingkungan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan, BPOM turut mendorong industri untuk menerapkan prinsip Triple Bottom Line (TBL) yang mencakup aspek sosial (people), lingkungan (planet), dan ekonomi (profit) secara berkelanjutan. Upaya BPOM dalam mendukung pelestarian lingkungan diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang mendukung environmental sustainability, termasuk apresiasi terhadap industri yang berkomitmen menjaga lingkungan hidup.

Balai Besar POM di Mataram turut berperan dalam mendukung BPOM Net Zero Carbon Programme melalui penggunaan lampu sensor gerak hemat energi, penghijauan di sekitar halaman kantor, pengolahan kompos, pemisahan sampah organik dan anorganik. Langkah ini dipilih sebagai upaya efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon dalam operasional kantor, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang diusung BPOM. Selain itu Laboratorium Balai Besar POM di Mataram juga memperoleh predikat Green Laboratory berdasarkan penilaian dari P3OMN.

BPOM juga terus mendorong industri pangan untuk memilah limbah sampah organik dan anorganik serta menggunakan kemasan pangan ramah lingkungan yang terbuat dari bahan yang mudah terurai, dapat didaur ulang dan aman bagi lingkungan dan manusia. Upaya ini penting untuk mengurangi limbah plastik yang dapat mencemari ekosistem darat maupun laut.

Dengan langkah-langkah ini, BBPOM di Mataram berkomitmen untuk turut mendukung mitigasi perubahan iklim sekaligus menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat melalui pengawasan produk obat dan makanan yang berwawasan lingkungan.

REVOLUSI INDUSTRI 5.0 YANG MERUBAH POLA BUDAYA MASYARAKAT

Perkembangan teknologi dan revolusi sosial (society 5.0) telah mengubah pola transaksi masyarakat, termasuk dalam pembelian Obat dan Makanan secara daring. Pertumbuhan e-commerce yang pesat menawarkan kemudahan bagi konsumen, namun juga membuka celah bagi kejahatan siber, seperti penjualan produk ilegal, palsu, atau tanpa izin edar. Sistem user

generated content (UGC) memungkinkan siapa saja menjual produk tanpa kontrol ketat, sehingga menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. BPOM menghadapi tantangan besar dalam mengawasi peredaran produk ini agar tetap aman, bermutu, dan sesuai regulasi.

Jumlah pengguna e-commerce di Indonesia terus meningkat, diperkirakan mencapai 99,1 juta pada 2029. Namun, pengaduan konsumen terkait transaksi online juga tinggi, mencapai 13,1% dari total pengaduan di YLKI pada 2023. Data Kementerian Kominfo menunjukkan penjualan obat dan kosmetik secara daring pernah menempati posisi ke-4 (18,9%) pada 2016, mencerminkan tingginya minat masyarakat, meski pemahaman mereka tentang keamanan produk masih rendah. Oleh karena itu, BPOM perlu memperkuat pengawasan berbasis digital dan memastikan setiap produk yang beredar melalui e-commerce memenuhi standar keamanan, guna melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk ilegal atau tidak terjamin mutunya.

REFORMASI BIROKRASI



Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Mataram menuju *good government and clean governance* serta pelayanan publik yang berkualitas, berpedoman pada Road Map-RB BPOM tahun 2020-2024. Pada Tahun 2021 BBPOM di Mataram telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan hingga tahun 2023 berupaya mempertahankan predikat WBK dan bertekad meraih predikat WBBM di tahun 2024, sehingga diperlukan upaya sosialisasi program pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kemudahan akses informasi publik. Pelayanan publik Balai Besar POM di Mataram kategori Layanan Prima dan nilai SAKIP Balai Besar POM di Mataram berpredikat A di lingkungan Badan POM.

INDUSTRIALISASI DAN PENGUATAN UMKM DI NTB

Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi ekonomi yang besar yang terletak pada sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, NTB perlu berfokus pada industrialisasi dan penguatan UMKM sebagai pilar utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, serta mengurangi ketimpangan sosial ekonomi.



UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian NTB, berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Sebagai bagian dari upaya industrialisasi, penguatan UMKM menjadi kunci dalam mempercepat proses transformasi ekonomi NTB. UMKM yang memiliki daya saing yang tinggi akan mampu berkolaborasi dengan sektor industri besar dan menjadi bagian dari rantai pasokan (supply chain) yang mendukung sektor industri.

Jumlah UMKM di NTB dari tahun ke tahun terus berkembang, namun demikian secara umum UMKM masih menghadapi kendala klasik seperti permodalan, perizinan, bahan baku, pemasaran produk, pengelolaan keuangan dan inovasi. Selain itu, data hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan pada tahun 2024 ditemukan sebanyak 20,37% sarana UMKM Tidak Memenuhi Ketentuan. Ketidakesesuaian di atas disebabkan oleh: (1) kurangnya komitmen pelaku usaha pangan dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan; (2) keterbatasan kapasitas yaitu kemampuan dan pengetahuan serta kesadaran pelaku usaha pangan terhadap mutu dan keamanan pangan; (3) keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang mutu dan keamanan pangan; dan (4) keterbatasan kelembagaan pangan terkait pengawasan mutu dan keamanan pangan.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi NTB meningkatkan daya saing UMKM yaitu melakukan program strategis industrialisasi, yang di antaranya bertumpu pada industri pengolahan (pertanian, peternakan, lingkungan, kehutanan, dan kelautan). Jenis industri yang dikembangkan di NTB adalah industri rumah tangga atau industri berskala mikro maupun kecil dengan pertimbangan ketersediaan bahan baku dan pangsa pasar yang berkaitan dengan

jumlah penduduk. Dalam konteks industrialisasi, yang menjadi sasarannya adalah peningkatan nilai tambah terutama pada komoditas pertanian sehingga pendapatan masyarakat juga ikut meningkat.

Sejalan dengan hal tersebut, BBPOM di Mataram juga berkontribusi bersinergi dengan OPD terkait melalui program pembinaan kepada UMKM agar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk sehingga meningkatkan daya saing UMKM. Dukungan yang diberikan oleh BPOM terhadap UMKM antara lain diwujudkan dengan memberikan kemudahan melalui berbagai upaya percepatan, penyederhanaan, dan pendampingan kepada UMKM. Pada tahun 2024 BBPOM di Mataram melalui inovasi **GEMILANG Pro-UMKM** telah melakukan pendampingan UMKM dan berhasil menerbitkan 266 sertifikat / izin penerapan / rekomendasi.

PENGARUS UTAMAAN GENDER (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan kepentingan gender dalam kebijakan dan program pembangunan guna menciptakan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Kesalahpahaman umum di masyarakat sering menyamakan gender dengan jenis kelamin atau menganggapnya hanya terkait dengan perempuan. Padahal, isu gender mencakup ketimpangan yang berdampak pada akses, hak, peran, dan kesempatan bagi kedua belah pihak. Untuk mengatasi ketimpangan ini, PUG menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan akuntabel. Strategi ini telah dicanangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang mewajibkan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengimplementasikan PUG sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Sebagai upaya percepatan implementasi, pada tahun 2012 ditetapkan Strategi Nasional (STRANAS) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). BPOM turut



berkomitmen dalam pengarusutamaan gender dengan menerbitkan berbagai regulasi, termasuk Keputusan Kepala BPOM tahun 2013 dan 2014 tentang pedoman serta pembentukan Kelompok Kerja PUG. Kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga diperkuat melalui kesepakatan bersama pada 2015. Pada 2022, BPOM menegaskan komitmen ini dalam arah

kebijakan tahun 2023 yang menekankan keadilan dan kesetaraan gender dalam pengawasan obat dan makanan, sehingga PUG menjadi bagian integral dalam memastikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

BBPOM Mataram berkomitmen mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai aspek kegiatan dan pelayanan. Setiap kegiatan mencantumkan data jenis kelamin dan usia dalam daftar hadir untuk memastikan keterwakilan yang inklusif. Selain itu, fasilitas bagi kelompok rentan telah disediakan guna mendukung akses yang setara bagi seluruh peserta. Dalam komunikasi resmi, prinsip PUG juga diterapkan dengan mencantumkan aspek kesetaraan gender dalam surat-menyurat. Dukungan terhadap PUG semakin diperkuat melalui tagging anggaran pada rincian output tertentu untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara terarah. Setiap bahan paparan dan spanduk kegiatan BBPOM Mataram juga telah dilengkapi dengan logo PUG '*Setara Berdaya*' sebagai simbol komitmen terhadap kesetaraan dan pemberdayaan gender. Dengan langkah-langkah ini, BBPOM Mataram terus berupaya menciptakan lingkungan kerja dan layanan yang adil serta responsif terhadap kebutuhan semua.

PEREDARAN OBAT ILEGAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT

Sejak Tahun 2016, di beberapa daerah termasuk di Provinsi NTB merebak isu penyalahgunaan PCC, Carnophen, Somadril, tramadol dan trihexyphenidil. Sudah banyak pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Badan POM dan kepolisian terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Di Provinsi NTB peredaran gelap Tramadol sangat memprihatinkan, Tramadol bukan hanya menyasar orang dewasa termasuk remaja juga menjadi target sasaran. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang. Sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2022 kasus peredaran gelap tramadol, trihexyphenidyl, dextromethorphan dan oat obat tertentu (OOT) lainnya di Provinsi NTB tercatat mencapai 140 kasus

Adanya temuan produk ilegal mengindikasikan bahwa *supply* dan *demand* terhadap sediaan farmasi ilegal masih tinggi. Hal ini disebabkan karena mudahnya akses pembelian (secara online) menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena kepraktisannya. Disisi lain, temuan ini juga mengindikasikan bahwa Badan POM dan Polri secara terus menerus berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan makanan ilegal untuk melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman.

Adanya ancaman peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal yang sangat serius menyebabkan Presiden RI mencanangkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat pada Oktober 2017, agar secara serentak aksi nasional lintas sektor dilaksanakan di 34 Provinsi termasuk di Provinsi NTB, bersama dengan Pemerintah Daerah dan OPD terkait.

Dalam Aksi Nasional ini koordinasi dan kerjasama terpadu diperluas dengan pemangku kepentingan di daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, melalui strategi di bidang Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Hukum untuk memberikan efek jera.

Akhir-akhir ini trend dan modus kejahatan Obat dan makanan terlihat mengikuti perkembangan melalui *media online*, jika ini tidak diantisipasi akan menyebabkan tidak optimalnya/gagalnya operasi penyidikan pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan makanan. BBPOM di Mataram juga menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan tidak dapat ditangani sendiri karena produksi dan peredaran Obat dan Makanan ilegal begitu cepat dan luas, sehingga perlu dikoordinasikan dengan lintas sektor terkait terutama dalam jaringan "*Criminal Justice Sistem (CJS)*" dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan serta ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia) dan idEA (*Indonesian E-Commerce Association*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan, harus dimulai dari semangat dan persamaan persepsi antar penegak hukum bahwa tindak pidana di bidang Obat dan Makanan adalah termasuk kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak tatanan kehidupan saat ini serta berpengaruh besar terhadap kehidupan generasi penerus di masa mendatang.

BBPOM Mataram terus menekan peredaran obat ilegal dengan strategi kolaboratif. Kami menggandeng Bhabinkamtibmas, Babinsa, Bea Cukai, Asperindo, tokoh agama, SAKA POM, dan TP PKK sebagai agen cegah tangkal berbasis komunitas. Pendekatan ini memperluas edukasi dan pengawasan hingga ke kelompok rentan. Penegakan hukum tetap menjadi fokus utama dengan bekerja sama dengan aparat untuk menindak pelaku perdagangan obat ilegal serta mengedukasi masyarakat. Kami juga bermitra dengan PT Bintang Toedjoe dalam sosialisasi bahaya penyalahgunaan obat di sekolah-sekolah, menanamkan kesadaran sejak dini. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan publikasi bahaya OOT terus diperkuat melalui berbagai media dan kegiatan edukatif. Dengan sinergi ini, BBPOM Mataram berkomitmen menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman obat ilegal.

ANTI MICROBIAL RESISTANCE (AMR)

Balai Besar POM di Mataram memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kualitas obat yang beredar di Masyarakat. Ancaman penyerahan antibiotik tanpa resep dokter yang berisiko terjadinya AMR adalah masalah yang cukup serius. Fenomena serius ini disebabkan oleh beberapa faktor antaralain:

- Masyarakat masih kurang memahami tentang pentingnya menggunakan antibiotik yang tepat dan benar, cenderung menganggap antibiotik sebagai obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Hal ini yang mendorong penggunaan antibiotik tanpa resep dokter sehingga meningkatkan risiko AMR.
- Masyarakat dapat dengan mudah untuk mendapatkan antibiotika ditunjang dengan penjualan antibiotika secara bebas di apotik, toko obat maupun secara daring melalui berbagai platform e-commerce, keterbatasan pengawasan yang tidak memadai yang memberikan kemudahan bagi Masyarakat untuk membeli antibiotika tanpa resep dokter.
- Faktor penyebab yang memiliki peran juga dalam peningkatan AMR adalah faktor ekonomi, masyarakat tidak mampu untuk berobat ke dokter karena biaya konsultasi yang mahal atau sulit terjangkau sehingga memilih untuk membeli antibiotika secara mandiri di apotik atau toko obat.
- Pengendalian AMR belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan Pemerintah Daerah atau OPD terkait, tenaga medis, pelaku usaha dan masyarakat sehingga penanganan atau pengendalian AMR belum optimal atau komprehensif.

BBPOM Mataram terus berupaya menangani permasalahan *Antimicrobial Resistance* (AMR) melalui strategi yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu langkah utama adalah penggalangan komitmen bersama stakeholder melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta organisasi profesi seperti GP Farmasi, IAI, IDI, IBI, dan PPNI. Forum ini bertujuan untuk menyusun langkah konkret dalam pengendalian penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Pengawasan juga diperketat dengan menindak apotek yang masih menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. Sanksi diberikan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi guna mencegah penyalahgunaan antibiotik. Selain itu, BBPOM Mataram telah menerbitkan Surat Edaran kepada sarana apotek yang menegaskan larangan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter. Publikasi bahaya AMR juga diperkuat melalui berbagai kanal media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Lebih lanjut, BBPOM Mataram menginisiasi penerbitan Surat Edaran Gubernur sebagai langkah strategis untuk memperkuat regulasi dan memastikan kepatuhan di tingkat daerah. Dengan langkah-langkah ini, BBPOM Mataram

berkomitmen mengendalikan AMR demi melindungi kesehatan masyarakat dan efektivitas pengobatan di masa depan.

I.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

INTERNAL

1) Anggaran

Anggaran kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB sesuai DIPA awal tahun 2025 sebesar Rp.20.815.994.000, bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2025 SP DIPA-063.01.2.432960/2025.

2) Sumber Daya Manusia

Tabel 1. 1 Kebutuhan SDM BBPOM di Mataram Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2024

No.	Jabatan Fungsional/Struktural	Existing	ABK 2023	GAP
1	Jabatan Struktural	2	2	0
2	Jabatan Fungsional Ketata Usahaan	17	31	14
3	Jabatan Fungsional PFM	59	78	19
Total		78	111	33

Per Juni 2025, SDM yang dimiliki BBPOM di Mataram untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan sejumlah 78 orang dengan proporsi 61,54% perempuan dan 38,46% laki-laki. Jumlah SDM tersebut terdiri dari 65 (enam puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 13 (sepuluh) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah tersebut baru memenuhi kebutuhan SDM sebesar 70,27%, tentunya belum memadai untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB secara optimal.

Berdasarkan analisa beban kerja, untuk mendukung upaya penguatan tugas pokok dan fungsi, BBPOM di Mataram memerlukan SDM sebanyak 111 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 33 orang. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Tingkat pendidikan sebagian besar pegawai BBPOM di Mataram adalah S1 dan Profesi (apoteker). BBPOM di Mataram sebagai organisasi yang scientific based seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 maupun S3 yang lebih banyak dari saat ini.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Mataram harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Dengan peningkatan kompetensi SDM, diharapkan BBPOM di Mataram akan mampu menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks dengan semakin berkembang dan beragamnya modus pelanggaran di bidang Obat dan makanan.

3) Sarana Prasarana

Kantor BBPOM di Mataram memiliki bangunan Gedung seluas 3.514 m2 dengan luas tanah 3.922 m2, didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM. BBPOM di Mataram memiliki laboratorium pengujian kimia, dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi

ISO/IEC 17025:2017. Selain itu BBPOM di Mataram dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya. Rumah dinas BBPOM di Mataram memiliki bangunan Gedung seluas 200 m2 dengan luas tanah 250 m2. Dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, BBPOM di Mataram Tahun 2022 telah tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018 dan dalam rangka komitmen anti penyuapan Balai Besar POM di Mataram telah tersertifikasi ISO 37001:2016 pada tanggal 28 Desember 2023 dari PT. Sucofindo International Certification Services.

4) Sarana Komunikasi

Untuk merespon pengaduan maupun permintaan informasi dari masyarakat, BBPOM di Mataram menyediakan berbagai sarana komunikasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, baik itu melalui telepon, e-mail, hingga media sosial.



4) Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BBPOM di Mataram

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat

dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Untuk menjawab tuntutan ini BBPOM di Mataram telah memiliki instrumen yang menggunakan teknologi yang canggih, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS, PCR. Namun pemeliharaan dan kebutuhan operasional untuk instrumen tersebut membutuhkan biaya yang relatif tinggi dan memerlukan kompetensi penguji yang andal dalam menggunakan instrumen tersebut.

Keunggulan laboratorium BBPOM di Mataram:

- Standar Pemenuhan Laboratorium sesuai GLP dengan nilai tertinggi dibanding BB/BPOM lainnya
- Laboratorium utama di NTB untuk pengujian sampel barang bukti narkoba/psikotropika.
- Laboratorium spesifik pengujian komoditi pangan untuk parameter Ochratoxin dan residu pestisida.

EKSTERNAL**Kondisi Geografis dan Demografis**

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°5' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali
- Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur



Gambar 1. 4 Peta Wilayah UPT BPOM di Provinsi NTB

Provinsi NTB terdiri atas 2 pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (76,49 %) dan luas Pulau Lombok seluas 4.738,70 Km² (23,51%).

Dinas PMPD DUKCAPIL Provinsi NTB sesuai Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2024 mencatat jumlah penduduk NTB sebanyak 5,62 juta jiwa, dengan perbandingan 50,11% jenis kelamin laki-laki dan 49,89% jenis kelamin perempuan.

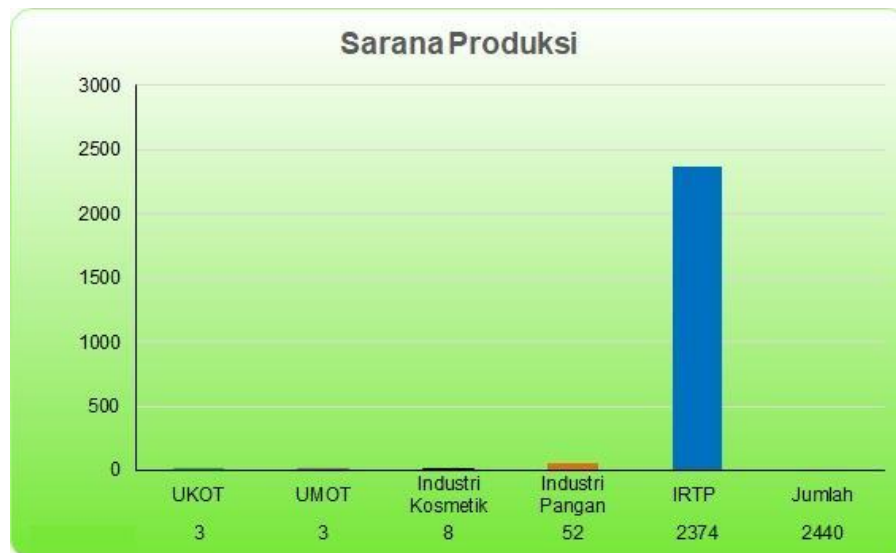
Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi industri kosmetik, industri obat tradisional (IOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT), usaha mikro obat tradisional (UMOT), industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan.

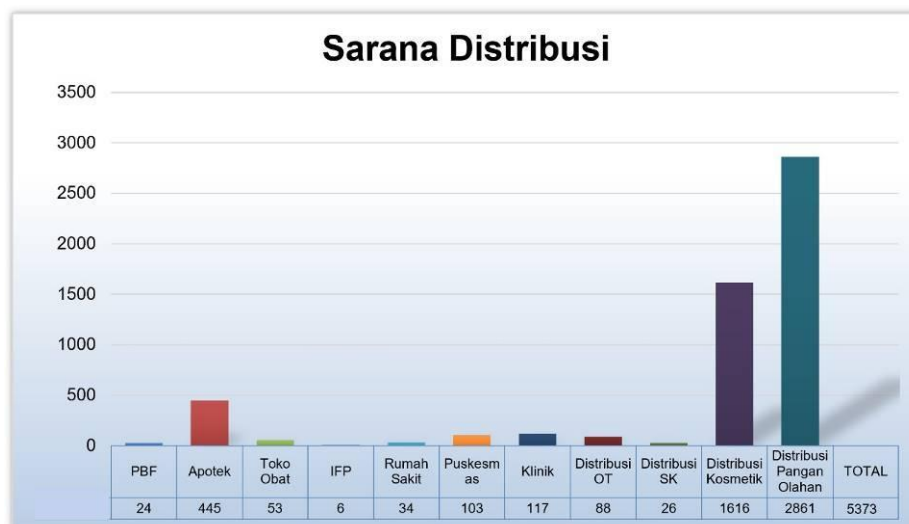
Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana pada gambar 1.5 dan gambar 1.6.

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025



Gambar 1. 5 Grafik Sarana Produksi di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2024



Gambar 1. 6 Grafik Sarana Distribusi di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram Tahun 2024

Total terdapat 2440 sarana produksi dan 5373 sarana distribusi di wilayah Kerja BBPOM di Mataram. Dalam pelaksanaan pengawasan, BBPOM di Mataram hanya menggunakan sarana transportasi darat.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

II. 1 RENCANA STRATEGIS

Sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian indikator program kerja, BBPOM di Mataram telah menyusun Draft Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Draft Rencana Strategis 2025-2029 memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan serta program dan kegiatan yang mengacu kepada Draft Renstra BPOM Tahun 2025-2029 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025. Visi pembangunan nasional Indonesia 2025-2029 adalah: Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. RPJMN 2025-2029 merupakan Tahap Pertama dari RPJPN 2025-2045.

Dalam menentukan indikator program dan kegiatan, BBPOM di Mataram telah mempertimbangkan permasalahan internal dan eksternal, potensi, peluang serta kendala yang ada di wilayah kerja BBPOM di Mataram yang mungkin akan terjadi dalam kurun waktu tersebut.

VISI BBPOM DI MATARAM

BBPOM di Mataram dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sejalan dengan visi dan misi Badan POM 2025-2029, yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

MISI BBPOM DI MATARAM

Dalam rangka mencapai visi, BBPOM di Mataram menjalankan misi sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

- 1) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM Mataram.
- 2) Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Oleh Lintas Sektor.
- 3) Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 4) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.
- 5) Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram.
- 6) Meningkatnya Efektivitas KIE di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram.
- 7) Meningkatnya Pendampingan UMKM Dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu.
- 8) Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram.
- 9) Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Siber dan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif.
- 10) Layanan Publik BBPOM Mataram yang Prima.
- 11) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.

SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BBPOM di Mataram, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, telah dirumuskan sejumlah sasaran kegiatan untuk periode 2025 – 2029. Sasaran kegiatan ini disusun untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BBPOM di Mataram, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Bidang Obat dan Makanan.

Berikut adalah sasaran kegiatan BBPOM di Mataram 2025 - 2029 yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor Obat dan Makanan:

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM Mataram
2. Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Oleh Lintas Sektor

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

3. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
4. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
5. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram
6. Meningkatnya Efektivitas KIE di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram
7. Peningkatnya Pendampingan UMKM Dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu
8. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram
9. Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Siber dan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif
10. Layanan Publik BBPOM Mataram yang Prima
11. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Berdasarkan SK Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Mataram Tahun 2025 nomor HK.02.02.14A.02.25.18 Tahun 2025, total terdapat 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) di tahun 2025.

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Sebagai dasar penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2025 disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala BBPOM di Mataram Nomor HK.02.02.14A.09.24.191 tanggal 20 September 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2025. Fungsi RKT ini antara lain untuk mewujudkan keselaran antara RENSTRA 2025-2029 dengan anggaran yang disusun untuk Tahun Anggaran 2025.

RKT selengkapnya terdapat pada lampiran.

PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi hasil, Kepala BBPOM di Mataram menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja BBPOM di Mataram tahun 2025 yang mengacu kepada rencana strategis BBPOM di Mataram tahun 2025-2029.

Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2025 memuat penugasan pencapaian target kinerja pada tahun berjalan dari Kepala Badan POM RI kepada Kepala BBPOM di Mataram.

Tabel 2. 1 Matriks Target Kinerja pada Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Dokumen Draft Renstra BBPOM di Mataram Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025		
			PK	RKT	Draft Renstra
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,5	100	86,5
		2. Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	26	26,00
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100	85,00
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100	100,00
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100	85,00
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98,8	-	98,8
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100	91,00
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100	85,00
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,00	100	96,00
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	75

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025		
			PK	RKT	Draft Renstra
		11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,20	100	84,20
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	100	63,00
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81,70	81,70	81,70
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,57	97,90	88,57
		2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13,00	13,00	13,00
		3. Jumlah desa pangan aman	4,00	4,00	4,00
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	1,00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87,30	94,0	87,30
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,00	100	92,00
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja	1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	-	90,00

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025		
			PK	RKT	Draft Renstra
	UPT				
8	Layanan Publik UPT yang prima	1. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,70	4,70
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,00	88,10	90,00
		2. Nilai AKIP UPT BPOM	83,90	83,90	83,90
		3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	89,0	5,00
		4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05	3,20	3,05

Terdapat 2 Indikator Kinerja pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang berbeda signifikan yaitu:

No	Indikator Kinerja pada PK	Target	Indikator Kinerja pada RKT	Target
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98,8%	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100%
2.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,0%	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14

Adanya perbedaan tersebut disebabkan karena saat penyusunan RKT Tahun 2025 masih mengacu kepada Renstra periode sebelumnya (2020-2024) dan penyusunan Indikator Kinerja belum final, sedangkan penyusunan PK Tahun 2025 telah mengacu kepada draft Renstra 2025-2029 dan penyusunan Indikator Kinerja telah final.

Selain perbedaan Indikator kinerja, terdapat 14 indikator yang targetnya berbeda antara PK dan RKT Tahun 2025. Hal ini juga disebabkan karena saat penyusunan RKT Tahun 2025 masih mengacu kepada Renstra periode sebelumnya (2020-2024) dan penyusunan indikator maupun target Indikator Kinerja

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

belum final, sedangkan penyusunan PK Tahun 2025 telah mengacu kepada draft Renstra 2025-2029 dan penyusunan Indikator maupun target Kinerja telah final.

Untuk melengkapi evaluasi dan monitoring Perjanjian kinerja pada tahun berjalan, maka dokumen perjanjian kinerja juga dilengkapi dengan rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) tiap bulan, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
		2. Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		7	10	20	25	35	50	60	70	80	90	98,8
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
		11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				37,5	37,5	37,5	37,5	62,5	62,5	62,5	63	63
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			81	81	81	81,25	81,25	81,25	81,5	81,5	81,5	81,7
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57
		15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			5	25	49	49	54	63	75	88	100	100
		16. Jumlah desa pangan aman			5	25	37	47	57	70	80	80	100	100
		17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			5	25	70	70	80	80	100	100	100	100
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan		10	15	25	45	55	60	65	75	80	90	100

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		olahan												
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		2,5	9,1	9,17	14,17	27,50	35	46,67	49,17	58,33	65,83	92
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	4,16	8,33	12,5	50	50	50	50	50	50	50	50	90
8	Layanan Publik UPT yang prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90
		23. Nilai AKIP UPT BPOM												83,9
		24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5
		25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3,05

Pada Triwulan II dilakukan perubahan target RAPK pada 7 IKS (tulisan berwarna merah) yang telah diusulkan dan disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, sebagai berikut :

1. Persentase cakupan sarana produksi pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan justifikasi Kurang cermat dalam perhitungan breakdown target RAPK sebelumnya.
2. Desa Pangan Aman dengan justifikasi Adanya perubahan KAK program Desa Pangan Aman yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan masih menunggu adanya relaksasi anggaran pada TW3, sehingga pelaksanaan kegiatan direncanakan menjadi 2 batch di TW1 dan TW3 tahun 2025

3. Pasar Pangan Aman dengan justifikasi Adanya perubahan KAK program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di karenakan adanya efisiensi anggaran.
4. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan justifikasi Adanya perubahan KAK program PJAS Aman yang di karenakan adanya efisiensi anggaran dan masih menunggu adanya relaksasi anggaran pada TW2, sehingga pelaksanaan kegiatan direncanakan menjadi 2 batch di TW1 dan TW2 tahun 2025.
5. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan justifikasi Perubahan tahapan proses dan bobot tahapan pada kategori pangan olahan serta waktu pelaksanaan pada beberapa tahapan yang mempengaruhi rata-rata persentase kemajuan tahapan pendampingan.
6. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar dengan justifikasi Adanya persepsi yang berbeda terkait cara perhitungan dimana di awal dipersepsikan bahwa target harus progresif setiap bulan (tidak flat) dan yang dihung berdasarkan jumlah pelaporan namun dikarenakan penilaian indikator Penelusuran Siber itu dihitung melalui persentase ketepatan waktu, maka dari Biro Perencanaan meminta agar perhitungan realisasi setiap bulannya ketika pelaporan UPT dikirimkan tepat waktu, maka nilainya itu harus 100% dan ketika pelaporan UPT ada yang tidak tepat waktu, maka perhitungannya harus didasarkan pada proporsionalitasnya.
7. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan dengan justifikasi Adanya blokir dan relaksasi Anggaran membuat keterlambatan dalam realisasi output, anggaran dan kinerja, harus dilakukan percepatan kegiatan intleijen, patrol siber/profiling sampai mendapatkan informasi yang A1 yang kemudian bisa di operasi dan menjadi perkara. Adanya efisensi di akun AEA juga berimbas pada sedikitnya hasil profiling patrol siber yang bisa diadakan informasi awal mendapatkan perkara sehingga diperlukan penyesuaian target namun di akhir tahun optimis bisa mencapai target.

METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu Sasaran Kegiatan diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja mengacu kepada Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM dan dan Surat Edaran Sestama BPOM Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator kinerja dari setiap Sasaran Kegiatan yang telah

ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan.

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) merupakan nilai kinerja organisasi (NKO) yang menunjukkan hasil konsolidasi/rata-rata dari seluruh realisasi indikator. NPSK digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja.

Formula menghitung NPSK:

$$\text{NPSK} = \sum \text{NPI} / \sum \text{I}$$

Ket: NPI: Nilai Pencapaian Indikator I: Indikator

Capaian Indikator Kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian masing-masing sasaran kegiatan dan Nilai Kinerja Organisasi dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan

Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

2. Untuk mengukur Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) atau Nilai Kinerja Organisasi (NKO) digunakan skala penilaian seperti ditunjukkan pada bagan berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

3. Untuk mengukur capaian masing-masing Sasaran Kegiatan maupun capaian indikator kinerja digunakan skala penilaian seperti ditunjukkan pada bagan berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Sasaran Kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk Sasaran Kegiatan yang memiliki lebih dari 1

(satu) indikator, maka Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) merupakan nilai rata-rata dari capaian seluruh indikator.

$$NPS = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3}{3}$$

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

b) NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

- 1) Capaian Perjanjian Kinerja Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
- 2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Sumber Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

- 3) Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

$$\text{Nilai Akhir: } \{(1) \times [(100\% - (2))] \times 100\}$$

- 4) Total Capaian Perjanjian Kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.
- 5) Nilai Kinerja Organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Mataram adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Mataram yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Mataram menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap bagian/fungsi dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Mataram
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi atau bagian menginput data kinerja pada aplikasi Siproval secara online rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas, Link Capaian RHPK BPOM dan pada aplikasi SIMETRIS *e-performance*.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi SIMETRIS pada menu *e-performance*. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi Simakin pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level pimpinan eselon 2 hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian ini, disajikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja BBPOM di Mataram sampai dengan Triwulan II tahun 2025 guna memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan selama triwulan berjalan. Analisis ini dilakukan dengan mengukur Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS)/Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Evaluasi kinerja mencakup analisis realisasi indikator kinerja Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan target pada Rencana Aksi perjanjian kinerja (RAPK) Triwulan II tahun 2025. Selain itu, capaian kinerja Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2025.

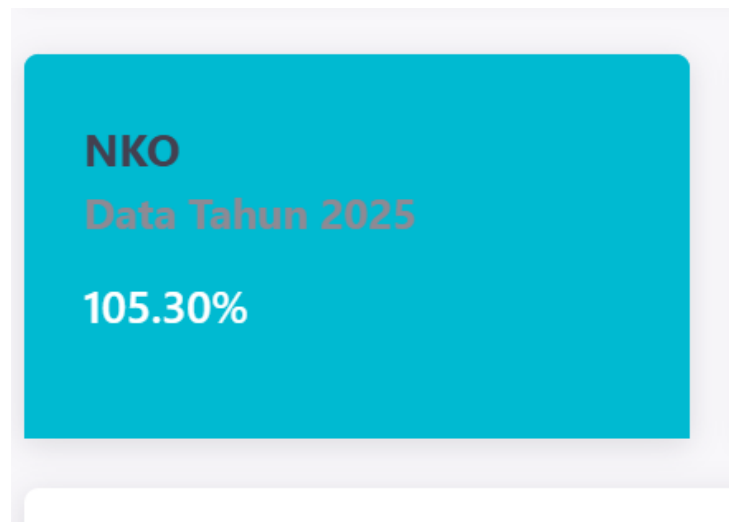
Selain itu, dilakukan identifikasi faktor keberhasilan atau kendala, serta evaluasi peningkatan atau penurunan kinerja. Langkah perbaikan dirancang berdasarkan hasil analisis program/kegiatan yang mendukung pencapaian target, serta efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Laporan ini juga mengulas pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dan tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya, guna memastikan peningkatan kualitas layanan dan efektivitas organisasi di masa mendatang. Capaian kinerja Triwulan II tahun 2025 ini diukur dengan membandingkan realisasi 25 (dua puluh lima) indikator kinerja pada 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan target Triwulan II tahun 2025 pada RAPK Tahun 2025.

Pada Triwulan II tahun 2025, hanya 7 dari 9 sasaran kegiatan yang dapat dievaluasi karena 5 indikator kinerja dari 2 sasaran kegiatan lainnya memiliki indikator yang pengukurannya tidak dilakukan di Triwulan II 2025 ataupun hanya dilakukan di akhir tahun 2025.

Data Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) atau Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dari Aplikasi Simetris menu *E-Performance* yang terintegrasi antara perencanaan dan monitoring evaluasi. Capaian kinerja pada Aplikasi Simetris terintegrasi dengan Aplikasi SIMAKIN yang menghasilkan *output* berupa realisasi capaian SKP Kepala Balai serta predikat kinerja organisasi. Diperoleh nilai NPSS atau kinerja organisasi sebesar 105,30% dengan predikat kinerja ISTIMEWA.

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025



Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dari aplikasi simetris.pom.go.id/eperformance

Tabel 3. 1 Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dan Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	JUNI				NILAI SASARAN KEGIATAN
				TARGET BULAN	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN Normalisasi	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)							105,30%	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,50	95,54	110,46%	110,00%	105,30%
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	97,08	114,21%	110,00%	
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00%	100,00%	
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65%	110,00%	
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	35,00	36,67	104,76%	104,76%	

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	JUNI				
				TARGET BULAN	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN Normalisasi	NILAI SASARAN KEGIATAN
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89%	109,89%	
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	93,33	109,80%	109,80%	
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,00	98,62	102,73%	102,73%	
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	97,92	130,57%	110,00%	
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,20	102,28	121,47%	110,00%	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	37,50	37,50	100,00%	100,00%	100,00%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81,25	85,60	105,35%	105,35%	105,35%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,57	94,48	106,67%	106,67%	102,05%
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	49,00	49,23	100,47%	100,47%	
		16	Jumlah desa pangan aman	47,00	47,50	101,06%	101,06%	
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70,00	70,00	100,00%	100,00%	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	55,00	55,00	100,00%	100,00%	100,00%

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	JUNI				
				TARGET BULAN	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN Normalisasi	NILAI SASARAN KEGIATAN
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	27,50	33,33	121,21%	110,00%	110,00%
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00%	100,00%	100,00%
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-		
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-		
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-		
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-		
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-		

Dari 7 sasaran kegiatan BBPOM di Mataram yang diukur capaiannya pada Triwulan II tahun 2025 diperoleh 4 sasaran kegiatan dengan Nilai Sasaran kegiatan (NSK) dengan kategori “sangat baik”, dan 3 sasaran kegiatan dengan kategori “baik.

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)

Secara ringkas capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Balai Besar POM di Mataram sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Target, realisasi dan capaian IKS Balai Besar POM di Mataram sampai dengan Triwulan II tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TW 2 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	8. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,50	95,54	110,46%

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TW 2 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
	Olahan di wilayah kerja UPT	9. Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-
		10. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	97,08	114,21%
		11. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00%
		12. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65%
		13. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	35,00	36,67	104,76%
		14. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89%
		15. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	93,33	109,80%
		16. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,00	98,62	102,73%
		17. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	97,92	130,57%
		18. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan	84,20	102,28	121,47%

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TW 2 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
		yang diawasi sesuai ketentuan			
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	19. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	37,50	37,50	100,00%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	20. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81,25	85,60	105,35%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	21. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,57	94,48	106,67%
		22. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	49,00	49,23	100,47%
		23. Jumlah desa pangan aman	47,00	47,50	101,06%
		24. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70,00	70,00	100,00%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	25. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	55,00	55,00	100,00%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	26. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	27,50	33,33	121,21%
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang	27. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	50,00	50,00	100,00%

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TW 2 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
8	Layanan Publik UPT yang prima	28. Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	29. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-
		30. Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-
		31. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-
		32. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-

Dari 9 sasaran kegiatan dan 25 indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK), hanya 19 IKSK dari 7 sasaran kegiatan yang diukur pencapaiannya di Triwulan 2 tahun 2025. Terdapat 8 indikator yang capaiannya dengan kategori “sangat baik”, 5 indikator yang capaiannya dengan kategori “baik” dan 6 indikator dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulanan Tahun 2025 terhadap target triwulanan yang bersangkutan, membandingkan realisasi kinerja triwulanan bersangkutan terhadap realisasi triwulanan sebelumnya, membandingkan realisasi triwulan dengan target Tahun 2025 serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja, Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Sasaran Kegiatan 1.
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan pertama mempunyai 11 (sebelas) indikator kinerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan pertama.

NO SK	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,50	95,54	110,46%	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO				
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	97,08	114,21%	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00%	Baik
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	35,00	36,67	104,76%	Sangat Baik
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89%	Sangat Baik
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	93,33	109,80%	Sangat Baik

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

NO SK	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,00	98,62	102,73%	Sangat Baik
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	97,92	130,57%	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,20	102,28	121,47%	Tidak Dapat Disimpulkan

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja serta analisis capaian masing – masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan 1 di Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{sampel Sediaan Farmasi berisiko} = (A + B + C + D) / 4$$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d+e

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%),

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$.

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot: 10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
 $= (a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan $= (a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan **kinerja UPT yang melakukan sampling**

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) × 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji **menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling**

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan

2. Pengujian

3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi **kinerja UPT yang melakukan sampling**

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) / 2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) (*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$(a1 + a2) / 2$$

Keterangan:

a1 = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

a2 = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

$(\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel}) \times 100\%$.

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

$(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling

2. SLA Pengujian

3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

$(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai} / \text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

$(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik}) \times 100\%$.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Keterangan:

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.3 Target, realisasi dan %capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	%Capaian	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,5	95,54	110,46 	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 95,54% dari target 86,5% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 110,46% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”.

Di Triwulan II tahun 2025 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan terhadap 428 sampel sampel sediaan farmasi yang terdiri dari 109 sampel obat, 102 Obat bahan Alam (OBA), 188 kosmetik, dan 29 Suplemen Kesehatan (SK). Telah dilakukan pengujian terhadap 447 sampel sediaan farmasi yang terdiri dari 116 sampel obat, 65 OBA, 231 kosmetik dan 35 SK. Seluruh sampel yang disampling, diperiksa dan diuji telah sesuai dengan perencanaan dan pedoman sampling dan telah dilaporkan tepat waktu.

Hasil Perhitungan:

(Obat = 100 % + OBA= 100 % + Suplemen Kesehatan = 100 % + Kosmetik= 100 % / 4 = 100 %)

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	%Capaian TW 2	Realisasi TW 1	%Capaian TW 1
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,54	110,46	100,0	115,61

Realisasi dan %Capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW 2 mengalami penurunan dibandingkan dengan TW 1. Hal ini disebabkan karena penurunan % Pemenuhan Target Pengawasan khususnya jumlah sampel yang diuji dibandingkan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium yaitu komoditi OBA (TW 1 sebesar 100% sedangkan TW 2 sebesar 82,68%), Kosmetik (TW 1 sebesar 100% sedangkan TW 2 sebesar 82,05%), SK (TW 1 sebesar 100% sedangkan TW 2 sebesar 82,86%).

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 2	%Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,5	95,54	110,46 	Melampaui

Penetapan target indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersifat flat, dengan kata lain target tahunan dan target tiap triwulan sama yaitu 86,5%. Berdasarkan hasil realisasi sampai dengan TW 2, target akhir tahun 2025 telah tercapai sebesar 110,46%. capaian tersebut masuk pada kriteria Tercapai/Melampaui.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi melebihi target karena dukungan serta koordinasi yang baik antara tim inspeksi dan tim pengujian dalam implementasi renlak sampling yang telah disusun berdasarkan ketersediaan reagen / media dan alat laboratorium untuk memastikan seluruh sampel dapat diuji sesuai dengan parameter uji kritis / wajib sesuai jukmis sampling 2025. Kompetensi petugas yang mumpuni menjadi salah satu pendukung keberhasilan capaian, telah mengikuti Bimtek Sampling, Iklan dan Penandaan dan in house training pengujian. Petugas juga melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman / juknis yang berlaku. Laboratorium BBPOM di Mataram juga telah menerapkan Digitalisasi Pelaporan dan mengimplementasikan Inovasi SiOpa Lagi JJ (Sistem Pengopersian Alat Lab Jarak Jauh) yang mampu memonitor penyelesaian uji sampel secara realtime sehingga tidak terjadi pengulangan pengujian akibat adanya kendala teknis saat pengoperasian alat lab. Hal tersebut berdampak signifikan dalam capaian time line uji tepat waktu. Monev secara rutin dan koordinasi intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKSK ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

1. Agar Pejabat Pengadaan memastikan ketersediaan reagen yang baru bisa terpenuhi di bulan September
2. Koordinasi dengan Lab BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Kupang untuk menambah kemampuan uji.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- a. Terkait kegiatan Sampling dan Pemeriksaan Sampel
Melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan, ketepatan waktu pelaporan

sampling melalui SIPT serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. dan pelaporan penarikan obat tepat waktu.

b. Terkait kegiatan pengujian sampel

Melakukan evaluasi secara rutin terkait Ketepatan waktu dalam penyelesaian uji sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu dan kelengkapan laporan pengujian melalui SIPT serta ketepatan dalam pengambilan Kesimpulan.

b. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Cara Perhitungan dan formula:

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO = **$(A / B) \times 100\%$**

Keterangan:

- A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

Pengukuran Indikator ini akan dilakukan di akhir Tahun 2025.

c. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Cara Perhitungan dan Formula

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan =

$$20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan:

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling ^(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling ^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan:

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Keterangan:

1. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
2. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
3. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
4. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 - a. kesesuaian target sampel UPT;
 - b. kesesuaian parameter uji;

- c. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 - d. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 - e. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
5. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain:
- a. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 - b. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 - c. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 - d. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
 - e. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3. 4 Target, realisasi dan %capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	%Capaian	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	97,08	114,21% 	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 97,08% dari target 85,00% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 114,21% dengan kategori ‘tidak dapat disimpulkan’.

Di Triwulan II tahun 2025 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan 156 sampel pangan olahan dari 156 sampel yang direncanakan (100,00%). Telah dilakukan pengujian terhadap 150 sampel dari total 212 sampel yang masuk ke laboratorium. Seluruh sampel yang

disampling, diperiksa dan diuji telah sesuai dengan pedoman sampling dan telah dilaporkan tepat waktu.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	%Capaian TW 2	Realisasi TW 1	%Capaian TW 1
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,08	114,21%	98,80	116,24

Realisasi dan %Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW 2 mengalami penurunan dibandingkan dengan TW 1. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan % Pemenuhan Target sampel khususnya jumlah sampel yang diuji dibandingkan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium yaitu TW 1 sebesar 94,02% sedangkan TW 2 sebesar 85,38.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 2	%Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	97,08	114,21 	Melampaui

Penetapan target indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersifat flat, dengan kata lain target tahunan dan target tiap triwulan sama yaitu 85,00%. Berdasarkan hasil realisasi Triwulan II 2025, maka target akhir tahun 2025 telah tercapai 114,21%. capaian tersebut masuk pada kriteria Tercapai/Melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi melebihi target karena dukungan serta koordinasi yang baik antara tim inspeksi dan tim pengujian dalam implementasi renlak sampling yang telah disusun berdasarkan ketersediaan reagen / media dan alat laboratorium untuk memastikan seluruh sampel

dapat diuji sesuai dengan parameter uji kritis / wajib sesuai jukmis sampling 2025. Kompetensi petugas yang mumpuni menjadi salah satu pendukung keberhasilan capaian, telah mengikuti Bimtek Sampling, Iklan dan Penandaan dan in house training pengujian. Petugas juga melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman / juknis yang berlaku. Laboratorium BBPOM di Mataram juga telah menerapkan Digitalisasi Pelaporan dan mengimplementasikan Inovasi SiOpa Lagi JJ (Sistem Pengopersian Alat Lab Jarak Jauh) yang mampu memonitor penyelesaian uji sampel secara realtime sehingga tidak terjadi pengulangan pengujian akibat adanya kendala teknis saat pengoperasian alat lab. Hal tersebut berdampak signifikan dalam capaian time line uji tepat waktu. Monev secara rutin dan koordinasi intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKSK ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

- Perbaikan instrumen ICP segera diselesaikan dan pengujian menggunakan metoda analisa alternatif

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Terkait kegiatan Sampling dan Pemeriksaan Sampel
Melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan, ketepatan waktu pelaporan sampling melalui SIPT serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi pangan olahan tepat waktu
2. Terkait kegiatan pengujian sampel
Melakukan evaluasi secara rutin terkait Ketepatan waktu dalam penyelesaian uji sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu dan kelengkapan laporan pengujian melalui SIPT serta ketepatan dalam pengambilan Kesimpulan.

d. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT=

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3. 5 Target, realisasi dan %capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	%Capaian	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100% 	Baik

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 100% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 100% dengan kategori “baik”.

Sampai dengan Bulan Juni 2025 telah dilakukan pengujian terhadap 6 sampel KLB keracunan pangan (KLB KP). Seluruh parameter uji telah sesuai dengan pedoman sampling dan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP telah tepat/sesuai.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	%Capaian TW 2	Realisasi TW 1	%Capaian TW 1
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100%	-	-

Realisasi dan %Capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT tidak dapat dibandingkan dengan TW 1 karena pada TW 1 belum terdapat realisasi kinerja. Pada TW 1 belum terdapat tools perhitungan realisasi kinerja sehingga IKSK ini dikecualikan dalam perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 2	%Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100% 	Tercapai

Penetapan target indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT bersifat flat, dengan kata lain target tahunan dan target tiap triwulan sama yaitu 100,0%. Berdasarkan hasil realisasi Triwulan II 2025, maka target akhir tahun 2025 telah tercapai 100%. capaian tersebut masuk pada kriteria Tercapai.

Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja

Capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Realisasi mencapai target karena dukungan tim kerja pengujian sampel KLB KP dalam implementasi pedoman sampling serta ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP. Kompetensi petugas yang mumpuni menjadi salah satu pendukung keberhasilan capaian, telah mengikuti Bimtek penanganan KLB KP. Laboratorium BBPOM di Mataram juga telah menerapkan Digitalisasi Pelaporan dan mengimplementasikan Inovasi SiOpa Lagi JJ (Sistem Pengopersian Alat Lab Jarak Jauh) yang mampu memonitor penyelesaian uji sampel secara realtime sehingga tidak terjadi pengulangan pengujian akibat adanya kendala teknis saat pengoperasian alat lab. Hal tersebut berdampak signifikan dalam capaian time line uji tepat waktu. Monev secara rutin dan koordinasi intens antara Kepala Balai dan Ketua Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKSK ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Melakukan evaluasi secara rutin terkait Ketepatan waktu dalam penyelesaian uji sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu dan kelengkapan laporan pengujian melalui SIPT serta ketepatan dalam pengambilan Kesimpulan.
2. Melakukan peningkatan kompetensi personal dengan mengikuti Bimtek penanganan KLB KP.

e. Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A = Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling ^(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling ^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan:

$$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

C = Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan:

$$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$$

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan:

$$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 2} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan:

$$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan:

$$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

- b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3. 6 Target, realisasi dan %capaian Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	%Capaian	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00	100,00	117,65%	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 100,00% dari target 85,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 117,65% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”.

Sampai Triwulan II tahun 2025 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan 36 sampel pangan olahan dari 36 sampel yang direncanakan (100,0%). Telah dilakukan pengujian terhadap 49 sampel dari total 49 sampel yang masuk ke laboratorium dengan hasil uji 41 sampel MS dan 8 sampel TMS. Sampel yang masuk ke laboratorium berasal dari BBPOM

di Mataram sebanyak 36 sampel dengan hasil uji 28 sampel MS dan 8 sampel TMS dan BPOM di Bima sebanyak 13 sampel dengan hasil uji 13 sampel MS. Seluruh sampel yang disampling, diperiksa dan diuji telah sesuai dengan perencanaan dan pedoman sampling serta telah dilaporkan tepat waktu.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	%Capaian TW 2	Realisasi TW1	%Capaian TW 1
Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100,00	117,65%	100,00	117,65%

Realisasi dan %Capaian Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan TW 2 sama dengan TW 1.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW1	%Capaian	Kategori
Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00	100,00	117,65% 	Melampaui

Penetapan target indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan bersifat flat dengan target tahunan dan target triwulan sama yaitu 85,0%. Berdasarkan hasil realisasi di Triwulan II, maka target tahun 2025 telah tercapai sebesar 117,65%. capaian tersebut masuk pada kriteria Tercapai/Melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Capaian Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah melampaui target. Realisasi melebihi target karena dukungan serta koordinasi yang baik antara tim inspeksi dan tim pengujian dalam implementasi renlak sampling yang telah disusun berdasarkan ketersediaan reagen / media dan alat laboratorium untuk memastikan seluruh sampel dapat diuji sesuai dengan parameter uji kritis / wajib sesuai jukmis sampling 2025. Kompetensi petugas yang mumpuni menjadi salah satu pendukung keberhasilan capaian, telah mengikuti Bimtek Sampling, Iklan dan Penandaan dan in house training pengujian. Petugas juga melaksanakan sampling dan

pengujian sesuai pedoman / juknis yang berlaku. Laboratorium BBPOM di Mataram juga telah menerapkan Digitalisasi Pelaporan dan mengimplementasikan Inovasi SiOpa Lagi JJ (Sistem Pengopersian Alat Lab Jarak Jauh) yang mampu memonitor penyelesaian uji sampel secara realtime sehingga tidak terjadi pengulangan pengujian akibat adanya kendala teknis saat pengoperasian alat lab. Hal tersebut berdampak signifikan dalam capaian time line uji tepat waktu. Monev secara rutin dan koordinasi intens antara Ka Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKSK ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

- Perbaikan instrumen ICP segera diselesaikan
- Mengusulkan kepada Direktorat pengampu untuk menyampaikan hasil review tools penilaian mandiri kepada seluruh UPT secara berkala agar tidak terjadi salah perhitungan realisasi target

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Terkait kegiatan Sampling dan Pemeriksaan Sampel
Melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan, ketepatan waktu pelaporan sampling melalui SIPT serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi PIRT tepat waktu
2. Terkait kegiatan pengujian sampel
Melakukan evaluasi secara rutin terkait Ketepatan waktu dalam penyelesaian uji sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu dan kelengkapan laporan pengujian melalui SIPT serta ketepatan dalam pengambilan Kesimpulan.

f. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder = $(A + B) / 2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan termasuk saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder di Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Target, realisasi dan %capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	%Capaian	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	35,0	36,67	104,76 	Sangat Baik

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 36,67% dari target 35,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 104,76% dengan kategori “Sangat Baik”.

Jumlah *feedback* tindak lanjut yang diterima Balai Besar POM di Mataram di Triwulan II tahun 2025 sebanyak 22 dari 62 rekomendasi yang dikeluarkan. Seluruh tindak lanjut yang diperoleh berasal dari pelaku usaha yaitu sebanyak 14 (33,33%) tindaklanjut/*feedback* dan berasal dari lintas sektor yaitu sebanyak 8 (40%) tindaklanjut/*feedback*.

Rincian keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder berdasarkan jenis keputusan/rekomendasi di Triwulan II sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Rincian keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

No	Jenis Keputusan/Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindaklanjuti
1	keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	42	14 33,33%
2	keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	20	8 40%
TOTAL		62	22 35,48%

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	%Capaian TW 2	Realisasi TW 1	%Capaian TW 1
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	36,67	104,76%	11,76	117,65%

%Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada TW 2 mengalami penurunan dibandingkan dengan %capaian TW 1, yaitu sebesar 12,89%, namun realisasinya meningkat sebesar 24,91%.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 1	%Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98,8	36,67	37,11% 	Perlu upaya keras

Penetapan target indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan bersifat kumulatif. Berdasarkan realisasi di Triwulan II tahun 2025, target akhir Tahun 2025 baru tercapai sebesar 37,11%, sehingga perlu upaya keras agar target IKS ini dapat tercapai di akhir tahun 2025.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

di Triwulan II tahun 2025 indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 104,76%. Realisasi melebihi target didukung koordinasi yang baik antara Tim BBPOM di Mataram dengan Pemda (utamanya Dinas Kesehatan). Selain itu meningkatnya kepatuhan dan komitmen pelaku usaha dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan. Petugas juga secara rutin melakukan monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha, memastikan CAPA telah ditindaklanjuti. Monev secara rutin dan koordinasi intens antara Ka Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKS ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

- Tetap aktif berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan lintas sektor dan pelaku usaha terkait tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pembimbingan dan pengawalan terkait penyusunan rencana dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik pengawasan Obat dan makanan Kabupaten/Kota
2. Desk CAPA dengan pelaku usaha

g. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
= rata-rata persentase sub aspek 1-6
 - 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
 - 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
 - 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
 - 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
 - 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
 - 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%

- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

- C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Keterangan:

- a. Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
 2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau

sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan

3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- b. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3. 9 Target, realisasi dan %capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	%Capaian	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89% 	Sangat baik

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 100,00% dari target 91,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 109,89% dengan kategori “sangat baik”.

Di Triwulan II tahun 2025 sesuai dengan perencanaan telah dilakukan pemeriksaan sarana terhadap 4 sarana produksi sediaan farmasi, yang terdiri dari 1 sarana produksi Obat Bahan Alam (OBA) dan 3 sarana produksi kosmetik dengan hasil 3 sarana MK dan 1 sarana TMK dari sarana produksi kosmetik. Seluruh sarana yang diperiksa telah sesuai perencanaan, dilaporkan melalui SIPT dan ditindaklanjuti tepat waktu.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	%Capaian TW 2	Realisasi TW1	%Capaian TW 1
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	109,89%	100,00	109,89%

Realisasi dan %capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW 2 sama dengan TW 1.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 2	%Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89% 	Melampaui

Penetapan target indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersifat flat dengan target tahunan dan target triwulan sama yaitu 91,0%. Berdasarkan hasil realisasi di Triwulan II, maka target tahun 2025 telah tercapai sebesar 109,89%.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target. Realisasi melebihi target disebabkan karena kompetensi petugas yang telah mengikuti berbagai pelatihan yang mendukung pengawasan, antara lain: Inspektur Pangan, Inspektur OT, Inspektur Kosmetik. Selain itu setiap pemeriksaan dan tindak lanjut senantiasa dilaksanakan sesuai target *riskbased inspection*, pedoman dan ketentuan yang berlaku. Monev secara rutin dan koordinasi yang baik dan intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan tercapainya IKSK ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Koordinasi dengan internal terkait penyesuaian kalender kegiatan pengawasan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan kegiatan yaitu:

- a. Pemeriksaan 4 sarana produksi obat tradisional dan kosmetik dengan hasil 3 MK dan 1 TMK
- b. Monitoring dan evaluasi pengawasan sarana
- c. Peningkatan kompetensi yaitu Bimtek CPOB Topik Khusus bagi Inspektur CPOB

h. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$

Keterangan:

- * Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- * Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:
 - a. ketepatan waktu: pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
 - b. kesesuaian tindak lanjut: kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
 - c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:

- i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
- ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK)
- iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK)
- d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk: surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3. 10 Target, realisasi dan %capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	%Capaian	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	93,33	109,80%	Sangat Baik

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 93,33% dari target 85,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 109,80% dengan kategori “sangat baik”.

Di Triwulan II tahun 2025, sesuai dengan perencanaan telah dilakukan pemeriksaan sarana terhadap 20 sarana produksi pangan olahan. Yang terdiri dari 8 sarana PIRT dengan hasil 7 MK dan 1 TMK serta 12 sarana MD risiko rendah dengan hasil 5 MK dan 7 TMK.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	%Capaian TW 2	Realisasi TW 1	%Capaian TW 1
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,33	109,80%	-	-

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

Realisasi dan %Capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan tidak dapat dibandingkan dengan TW 1 karena pada TW 1 belum terdapat realisasi kinerja. Pada TW 1 belum terdapat tools perhitungan realisasi kinerja sehingga IKSK ini dikecualikan dalam perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW1	%Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	93,33	109,80% 	Melampaui

Penetapan target indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersifat flat dengan target tahunan dan target triwulan sama yaitu 85,0%. Berdasarkan hasil realisasi di Triwulan II, maka target tahun 2025 telah tercapai sebesar 109,80%. capaian tersebut masuk pada kriteria Tercapai/Melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah melampaui target. Realisasi melebihi target disebabkan karena kompetensi petugas yang telah mengikuti berbagai pelatihan yang mendukung pengawasan Inspektur Pangan. Selain itu setiap pemeriksaan dan tindak lanjut senantiasa dilaksanakan sesuai target *riskbased inspection*, pedoman dan ketentuan yang berlaku. Monev secara rutin dan koordinasi yang baik dan intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan tercapainya IKSK ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Koordinasi dengan internal terkait penyesuaian kalender kegiatan pengawasan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan kegiatan yaitu:

- a. Pemeriksaan 20 sarana produksi pangan olahan dengan hasil 12 MK dan 8 TMK
- b. Monitoring dan evaluasi pengawasan sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- c. Peningkatan kompetensi yaitu pelatihan Food Inspector Dasar Tahun 2025.

i. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjuti (b)

a. Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B)

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b. Kesesuaian Tindaklanjuti

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%

- c. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjuti.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjuti hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjuti) x 100%

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$.
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$.

Keterangan:

1. perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
2. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3. 11 Target, realisasi dan %capaian Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	%Capaian	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,00	98,62	102,73%	Sangat Baik

Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 98,62% dari target 96,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 102,73% dengan kategori “sangat baik”.

Di Triwulan II tahun 2025, sesuai dengan perencanaan telah dilakukan pemeriksaan sarana terhadap 120 sarana distribusi sediaan farmasi. Yang terdiri dari 63 sarana distribusi obat dengan hasil 52 MK dan 10 TMK; 3 sardis OBA dengan hasil 2 MK dan 1 TMK; 3 sardis SK dengan hasil 3 MK; dan 51 sarana distribusi kosmetik dengan hasil 28 MK dan 23 TMK.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	%Capaian TW 2	Realisasi TW 1	%Capaian TW 1
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,62	102,73%	-	-

Realisasi dan %Capaian Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat dibandingkan dengan TW 1 karena pada TW 1 belum terdapat realisasi kinerja. Pada TW 1 belum terdapat tools perhitungan realisasi kinerja sehingga IKSK ini dikecualikan dalam perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 2	%Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,00	98,62	102, 73% 	Melampaui

Penetapan target indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersifat flat dengan target tahunan dan target triwulan sama yaitu 85,0%. Berdasarkan hasil realisasi di Triwulan II, maka target tahun 2025 telah tercapai sebesar 98,62%. capaian tersebut masuk pada kriteria Tercapai/Melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Capaian indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target. Realisasi melebihi target disebabkan karena kompetensi petugas yang telah mengikuti berbagai pelatihan yang mendukung pengawasan, antara lain: Inspektur OT dan Inspektur Kosmetik. Selain itu setiap pemeriksaan dan tindak lanjut senantiasa dilaksanakan sesuai target *riskbased inspection*, pedoman dan ketentuan yang berlaku. Monev secara rutin dan koordinasi yang baik dan intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan tercapainya IKSK ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Perlu adanya penyamaan persepsi antara tim evaluator pusat dengan UPT, mengingat pola tindak lanjut yang dilakukan telah diterapkan sejak 2024 dan hasil evaluasi kesesuaian TL untuk sarana Apotek di tahun 2024 adalah seluruhnya dinyatakan sesuai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan kegiatan yaitu:

- a. Pemeriksaan 120 sarana distribusi sediaan farmasi dengan hasil 85 MK dan 34 TMK
- b. Monitoring dan evaluasi pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

j. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 70%B + 10%C

A : pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = $20\% \times ((\text{jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

B : Ketepatan tindak lanjut = $70\% \times ((\text{jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

C : Kesesuaian waktu pelaporan = $10\% \times ((\text{jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Keterangan:

- a. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- b. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa

2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3. 12 Target, realisasi dan %capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	%Capaian	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	97,92	130,57% 	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 97,92% dari target 75,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 130,57% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”.

Di Triwulan II tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 71 sarana dari target 68 sarana di Triwulan II 2025 (104,41%). Terdiri dari 17 distributor pangan dengan hasil 10 MK dan 7 TMK; 24 Ritel Pangan Modern dengan hasil 22 MK dan 2 TMK serta 30 Ritel Pangan Tradisional dengan hasil seluruhnya MK. Seluruh sarana yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	%Capaian TW 2	Realisasi TW 1	%Capaian TW 1
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,92	130,57%	100	133,33

Realisasi dan %Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW 2 mengalami penurunan dibandingkan dengan TW 1. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan % ketepatan tindak lanjut pada TW 1 sebesar 70% sedangkan TW 2 sebesar 67,04%.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 2	%Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	97,92	130,57 	Melampaui

Penetapan target indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersifat flat dengan target tahunan dan target triwulan sama yaitu 75,0%. Berdasarkan realisasi di Triwulan II, maka target tahun 2025 telah tercapai sebesar 130,57%.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target. Realisasi melebihi target karena kompetensi petugas yang telah mengikuti pelatihan yang mendukung pengawasan, antara lain: Inspektur Pangan. Selain itu setiap pemeriksaan dan tindak lanjut senantiasa dilaksanakan sesuai target *risk based inspection*, pedoman dan ketentuan yang berlaku. Monev secara rutin dan koordinasi intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKS ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Peningkatan pengetahuan petugas tentang pedoman tindak lanjut

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan kegiatan yaitu:

- Pemeriksaan 71 sarana distribusi pangan olahan dengan hasil 62 MK dan 9 TMK
- Monitoring dan evaluasi pengawasan sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain meliputi kesesuaian jumlah sarana yang diperiksa, pemenuhan target sarana, ketepatan waktu pelaporan dan ketepatan tindak lanjut.

k. Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b)/2$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

= Jumlah iklan yang selesai diawasi / Jumlah target iklan yang diawasi sesuai
renlak x 100%

b. Ketepatan waktu pelaporan

= Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu / Jumlah target iklan yang diawasi x
100%

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah
target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/
jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan
yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah
target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah
iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan
yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai
target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada
media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$
- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}) / 2$
 - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$
 - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan sesuai renlak}) \times 40\%$
- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan $((\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media}) \times 20\%$
- c. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$

Keterangan:

- a) Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- b) Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- c) Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- d) Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media

e) Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3. 13 Target, realisasi dan %capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	%Capaian	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,20	102,28	121,47% 	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 102,28% dari target 84,20% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 121,47% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”.

Di Triwulan II tahun 2025 telah dilakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sebanyak 468 iklan yang terdiri dari 70 sediaan obat, 172 kosmetik, 71 Obat Bahan Alam (OBA), 19 Suplemen Kesehatan dan 136 pangan olahan. Seluruh iklan yang diawasi telah sesuai dengan target/perencanaan dan telah dilaporkan tepat waktu

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	%Capaian TW 2	Realisasi TW 1	%Capaian TW 1
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	102,28	121,47%	99,96	118,71%

Realisasi dan %Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada TW 2 melampaui TW 1. Hal ini terutama disebabkan realisasi pengawasan iklan melebihi target pada iklan OBA dan iklan SK.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 2	%Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,20	102,28	121,47% 	Melampaui

Penetapan target indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan bersifat flat dengan target tahunan dan target triwulan sama yaitu 84,20%. Berdasarkan hasil realisasi di Triwulan II, maka target tahun 2025 telah tercapai sebesar 121,47%.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target. Realisasi yang melampaui target ini, didukung petugas yang kompeten, di mana seluruh petugas pengawas iklan telah mengikuti Bimtek Pengawasan Iklan serta melakukan pengawasan iklan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Monev secara rutin dan koordinasi intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKS ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Agar dapat dilakukan desk monev secara rutin dengan Direktorat pengampu terkait pengisian tools penilaian mandiri sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan dan perbedaan hasil antara UPT dan pengampu.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan kegiatan yaitu:

- Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sebanyak 468 iklan
- Monitoring dan evaluasi pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan antara lain meliputi kesesuaian jumlah iklan yang diperiksa, pemenuhan target iklan sesuai target proporsi media periklanan yang diawasi dan ketepatan waktu pelaporan.

Sasaran Kegiatan 2.**Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan kedua hanya berasal dari satu indikator, yaitu **Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.**

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%.

Keterangan:

- * Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- * Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025**Tabel 3. 14** Target, realisasi dan %capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	%Capaian	Kategori
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	37,50	37,50	100,00%	Sangat Baik

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 37,50% dari target 37,50% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 100,00% dengan kategori “Sangat baik”.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	%Capaian TW 2	Realisasi TW 1	%Capaian TW 1
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	37,50	37,50	-	-

Realisasi dan %Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW 2 tidak dapat dibandingkan dengan TW 1 karena tidak terdapat target pada TW 1.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 2	%Capaian	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	37,50	37,50	Perlu upaya keras

Penetapan target *progress* indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersifat kumulatif pada akhir tahun 2025 sebesar 63,00%. Berdasarkan hasil realisasi Triwulan II tahun 2025, Target akhir Tahun 2025 baru tercapai sebesar 37,50%, sehingga perlu upaya keras agar target dapat tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Triwulan II tahun 2025 telah melampaui target. Realisasi melebihi target disebabkan karena kompetensi petugas yang telah mengikuti berbagai pelatihan yang mendukung pengawasan Inspektur Pangan. Selain itu setiap pemeriksaan dan tindak lanjut senantiasa dilaksanakan sesuai target *riskbased inspection*, pedoman dan ketentuan yang berlaku. Monev secara rutin dan koordinasi yang baik dan intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan tercapainya IKS ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

- Usulan revisi target
- Pemeriksaan 2 (dua) sarana produksi MGS akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

-

Sasaran Kegiatan 3.**Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT**

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan ketiga yaitu **Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**.

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Laboratorium BBPOM di Mataram termasuk laboratorium Tingkat 3 bersama dengan 26 BB/BPOM lainnya.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT yang berada pada Tingkat 3 terdiri beberapa komponen yaitu pemenuhan terhadap:

1. Standar Ruang Lingkup;
2. Standar Peralatan;
3. Standar Kompetensi Laboratorium;
4. Standar Metode yang terverifikasi.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3. 15 Target, realisasi dan %capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	%Capaian	Kategori
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81,25	85,60	105,35% 	Sangat baik

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 85,60 dari target 81,25 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 105,35% dengan kategori “sangat baik”.

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

Hasil penilaian nilai indikator ini berdasarkan komponen penilaiannya sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Monev SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 Triwulan 2 Tahun 2025.

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 2 (%)	Target Nilai SKL TW 2 (%)	Capaian thd Target TW 2 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi				
1	BBPOM di Banda Aceh	73	83.8	80.2	50	46.5	72.6	71.5	101.5	99.4
2	BBPOM di Padang	77	83.6	87.6	100	22.3	81.6	76.8	106.2	106.0
3	Balai POM di Batam	67.3	82.1	82.3	30	26.9	66.2	64.4	102.8	98.4
4	Balai POM di Bengkulu	71.1	79.0	91.8	70	21.2	74	70.5	104.9	104.0
5	BBPOM di Bandar Lampung	77.2	79.0	81.1	80	46	76.3	76.2	100.1	98.8
6	BBPOM di Palembang	64.8	78.2	82.1	50	26.6	68.2	63	108.2	105.2
7	Balai POM di Jambi	59.1	79.1	86.4	20	17.5	62.6	58.3	107.4	105.9
8	Balai POM di Pangkalpinang	73.7	82.2	86.6	70	31	75.5	73.1	103.3	102.5
9	BBPOM di Bandung	81.7	85.3	88.2	80	67.2	83	80	103.7	101.6
10	BBPOM di Jakarta	72.8	82.3	85.9	50	72.8	75.6	69.9	108.1	103.8

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 2 (%)	Target Nilai SKL TW 2 (%)	Capaian thd Target TW 2 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi				
11	BBPOM di Serang	71.5	85.4	92.2	50	28.1	73.9	68.7	107.6	103.4
12	BBPOM di Yogyakarta	77.5	83.5	92.1	80	44.6	80.6	77.2	104.4	104.0
13	BBPOM di Denpasar	81.4	81.3	85.8	100	55.8	83.4	80.9	103.0	102.4
14	BBPOM di Mataram	81.7	86.8	93.9	90	53.9	85.6	81.25	105.3	104.7
15	BBPOM di Kupang	70.2	76.5	87.9	70	40.1	73.8	68.8	107.3	105.2
16	BBPOM di Banjar Baru	71.5	71.7	76.6	50	14.8	62.7	57.91	108.2	87.6
17	BBPOM di Palangkaraya	72.5	78.1	78.6	90	25	75.3	71	106.0	103.8
18	BBPOM di Pontianak	73.4	79.5	91.1	60	24.3	72.4	72.1	100.4	98.6
19	Balai POM di Tarakan	39.1	37.1	34.8	40	4.8	34	32	106.2	86.9
20	Balai POM di Gorontalo	65.1	82.4	71.8	50	25.7	68.1	64.7	105.3	104.6
21	Balai POM di Palu	77.0	83.4	87.3	70	50	78.2	75.73	103.2	101.5
22	Balai POM di Sofifi	45.8	51.4	54.8	80	11.5	53.8	40	134.5	117.5
23	Balai POM di Ambon	73.9	81.2	72.1	70	43.5	73.4	71.85	102.2	99.3
24	Balai POM di Kendari	74.5	83.0	89.3	70	53.2	78.7	72	109.3	105.6
25	Balai POM di Mamuju	49.6	59.2	57.9	60	4	53.6	49.2	108.9	108.0
26	BBPOM di Jayapura	70	72.7	83.9	60	37.8	68.9	65.9	104.5	98.4
27	Balai POM di Manokwari	64.1	64.8	72.2	100	11.8	68	61.8	110.0	106.1
Rata-rata		69.5	76.7	80.5	66.3	33.6	71.1		106.4	102.3

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	%Capaian TW 1	Realisasi TW 1	%Capaian TW 1
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85,60	105,35%	83,90	102,69%

Realisasi dan %Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada TW 2 melampaui TW 1.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 2	%Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81,70	85,60	104,77% 	Melampaui

Penetapan target indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium bersifat kumulatif. Berdasarkan realisasi di Triwulan II, maka target tahun 2025 telah tercapai sebesar 104,77%.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target. Nilai SKL BBPOM di Mataram berdasarkan monev P3OMN pada TW II tertinggi secara Nasional. Realisasi melebihi target karena tingginya komitmen Tim Kerja dalam melaksanakan rencana pemenuhan target SKL yang telah ditetapkan, meliputi: SRL, Kompetensi, Peralatan dan Verifikasi Metode Analisa pada setiap laboratorium. Pengadaan reagen / media berdasarkan urgensi/ frekuensi penggunaan (skala prioritas), verifikasi MA dilakukan bersamaan dengan pengujian sampel rutin, peningkatan kompetensi melalui pelatihan secara daring atau diseminasi hasil pelatihan, serta menetapkan penyusunan timeline verifikasi metode juga turut mendukung keberhasilan capaian.

Implementasi Inovasi I-CONIC (Instrument Consultation Clinic) di Laboratorium Pengujian juga mampu menjaga kinerja peralatan laboratorium senantiasa dalam kondisi yang optimal. Monev secara rutin dan koordinasi intens antara Ka Balai, Ketua Tim, Penyelia dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKSK ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- a. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi Laboratorium, Standar Peralatan, dan Standar Metode Terverifikasi.
- b. Monitoring pengisian tools SKL serta data dukungnya telah sesuai dengan ketentuan
- c. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup dan Standar Metode Terverifikasi dengan melaksanakan verifikasi metode dan pengujian sampel sesuai perencanaan
- d. Pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan melaksanakan pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan secara luring maupun daring, baik yang diselenggarakan oleh pihak eksternal maupun dari P3OMN
- e. Pemenuhan Standar Peralatan dilakukan dengan pengadaan alat laboratorium berupa HPLC detektor UV-PDA-RF, Automatic destilasi, miscroskop, incubator dan lain-lain.

Sasaran Kegiatan 4.

Meningkatnya Efektivitas KIE Di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan keempat ini. Capaian keempat indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan 4 di Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

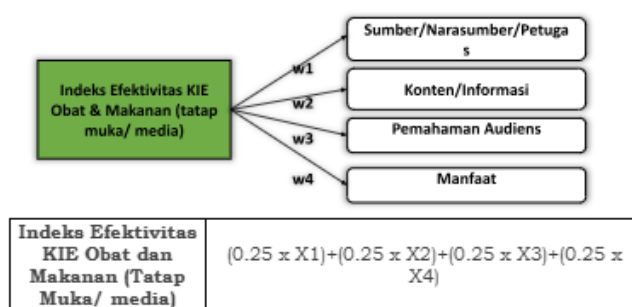
NO SS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW2	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,57	94,48	106,67%	Sangat Baik
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	49,00	49,23	100,47%	Sangat Baik
		Jumlah desa pangan aman	47,00	47,50	101,06%	Sangat Baik
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70,00	70,00	100,00%	Baik

Pengukuran capaian serta analisis capaian masing – masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan 4 pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Cara Perhitungan dan Formula:

- Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.
- Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*

Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada Triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 16 Target, realisasi dan %capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	%Capaian	Kategori
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,57	94,48	106,67% 	Sangat baik

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 94,48 dari target 88,57 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 106,67% dengan kategori “sangat baik”.

Rincian hasil indeks KIE dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Total Responden : 263 Indeks Rata-Rata/Final : 94,48 ** EFEKTIF ** 					
Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 220)			Indeks Survei MEDIA (total responden : 43)		
Average Values of	Skala 4	Skala 100	Average Values of	Skala 4	Skala 100
Narasumber/Petugas	3.991	99.773	Sumber Informasi	3.779	94.477
Konten/Informasi	3.986	99.659	Konten/Informasi	3.721	93.023
Pemahaman Audiens	3.891	97.273	Pemahaman Audiens	3.349	83.721
Manfaat	3.982	99.546	Manfaat	3.535	88.372
Indeks Tatap Muka	99.063		Indeks Media	89.898	

Jumlah Responden			Indeks			
Tatap muka	Media	Total	Indeks Tatap Muka	Indeks Media	Indeks KIE	Kategori
220	43	263	99,063	89,898	94,48	Efektif

Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	%Capaian TW 2	Realisasi TW 1	%Capaian TW 1
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,48	106,67%	94,95	107,20%

%Capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada TW 2 mengalami penurunan dibandingkan dengan %capaian TW 1, yaitu sebesar 0,53%.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 2	%Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,57	94,48	106,67% 	Melampaui

Penetapan target indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT bersifat flat, dengan kata lain target tahunan dan target tiap triwulan sama yaitu 88,57. Berdasarkan realisasi Triwulan II, maka target tahun 2025 telah tercapai sebesar 106,67%.

Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja

Capaian di Triwulan II tahun 2025 indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT telah mencapai target yang ditetapkan. Realisasi melebihi target karena kompetensi petugas dalam penguasaan materi, sehingga penyampaian menjadi menarik dan informatif. Selain itu media KIE dilengkapi dengan media visual seperti gambar, infografis, video singkat, atau ilustrasi yang mudah dipahami, terutama untuk kelompok yang kesulitan membaca. Materi KIE juga senantiasa disesuaikan dengan audience untuk meminimalkan gap pemahanan terhadap KIE yang diberikan

Rekomendasi Peningkatan Kinerja

-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- Pelaksanaan kegiatan KIE dan pengisian survey oleh 263 responden yang menerima manfaat KIE baik sebagai peserta kegiatan KIE yang sedang

diselenggarakan BBPOM di Mataram maupun responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KIE dan pengisian survey oleh responden

b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Kegiatan intervensi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dilakukan terhadap sekolah level SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan di sekolah adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan serta pengawalan.

Tujuan intervensi keamanan pangan di sekolah yaitu mensosialisasikan materi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan serta mencetak Kader Keamanan Pangan Sekolah dari komunitas sekolah.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan pangan di sekolah Tahun 2025 direncanakan di Kota Mataram dengan target sebanyak 13 sekolah dan 25 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2024. Karena adanya efisiensi anggaran, pada tahap I ini hanya ditargetkan 7 sekolah yang akan diintervensi, yaitu: SD IT Anak Sholeh, SDN 10 Cakranegara, SDN 7 Mataram, SMP Kusuma Cakranegara, MTsN1 Mataram, SAMN 1 Mataram dan MAN 2 Mataram.

Pada Triwulan II tahun 2025 yang ditargetkan dan diukur berupa *progress* pencapaian indikator. Progres pencapaian indikator diperoleh dari keseluruhan masing-masing tahapan kegiatan dengan bobot progress kegiatan yang telah dilaksanakan.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Realisasi dan capaian indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman di Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Target dan realisasi serta capaian Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	% Capaian	Kategori
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman	49%	49,23%	100,47%	Sangat Baik



Realisasi *progress* Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 49,23% dari target 49%, sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 100,47% dengan kategori "sangat baik".

Rincian pembobotan progress dan realisasi progress Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman pada Triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 18 Realisasi progress Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman

No	Kegiatan	Pembobotan Progress (%)	Realisasi (%)
1	Advokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	25	25
2	Sosialisasi keamanan pangan Batch 1	10	10,77
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah Batch 1	12,50	13,46
4	Pengawasan	5	0
5	Sosialisasi Keamanan pangan Batch 2	12,50	0
	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Batch 1	12,50	0
6	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Batch 2	12,50	0
TOTAL (%)		100	49,23

Progress realisasi ini diperoleh dari kegiatan Advokasi Lintas Sektor keamanan PJAS, Sosialisasi keamanan pangan batch 1, dan Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah Batch 1.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	% Capaian TW 2	Realisasi TW 1	% Capaian TW 1
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman	49,23	100,47%	5,0%	100,0%

Realisasi dan %Capaian progres Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman pada TW 2 mengalami kenaikan dibandingkan TW 1.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW1	% Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman	100% (13)	49,23	49,23% 	Perlu upaya keras

Penetapan target *progress* indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman pada akhir tahun 2025 sebesar 100% (13 sekolah). Berdasarkan hasil realisasi Triwulan II tahun 2025, Target akhir Tahun 2025 baru tercapai sebesar 49,23%, sehingga perlu upaya keras agar target dapat tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

capaian Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman mencapai target di Triwulan II 2025 disebabkan karena dukungan dan komitmen dari Tim Kerja serta koordinasi yang baik dengan Pemda dalam mengawal perencanaan kegiatan Pro PN. Selain itu, monev secara rutin dan koordinasi intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKSK ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- Pada 20 Maret 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan di Kota Mataram sebagai bagian dari tahapan Advokasi. Kegiatan koordinasi dihadiri oleh Asisten 1, Asisten 2, Kepala Dinas Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kadis Ketahanan Pangan, Plt Kadisperindag, Karo Pemerintahan, dan perwakilan OPD lainnya. Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April 2025 di kantor BBPOM Mataram.
- Advokasi Lintas Sektor keamanan PJAS dilaksanakan pada 22 April 2025 terintegrasi dengan Program PRO PN lainnya yaitu desa dan pasar pangan aman. Kegiatan dibuka oleh Asisten 1 Kota Mataram H.L. Martawang, SE, MSi, turut hadir pada pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. H. Emirald Isfihan, MARS., MH., CMC., FISQua. Dan OPD di lingkup Kota Mataram, Kanwil Kemenag NTB, Kemenag Kota Mataram, Camat Sandubaya dan Camat Ampenan, Lurah Babakan, Lurah Ampenan Selatan, Lurah Sapta Marga, Kepala Pasar ACC dan Kepala Pasar Tanjung Karang, serta para Kepala Sekolah yang menjadi sasaran Intervensi Kemanan Pangan tahun 2024 dan 2025
- Pada 14 Mei 2025 telah dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Guru Sekolah di Wilayah Mataram, dengan 45 peserta dari unsur guru hadir mengikuti kegiatan tersebut yang berasal dari 27 sekolah di Kota Mataram.
- Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah Batch 1 dilaksanakan pada 21 Mei 2025 yang diikuti oleh 14 peserta dari 7 sekolah di Kota Mataram yang akan diintervensi, yaitu: SDN 7 Mataram, SDN 10 Cakranegara, SD IT Anak Sholeh Mataram, SMPNK Kusuma St. Antonius, MTsN 1 Mataram, SMAN 1 Mataram, dan MAN 1 Mataram.

c. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program percepatan penurunan stunting. Kebijakan pemerintah lainnya yang perlu didukung adalah pemulihan ekonomi nasional karena dampak pandemi Covid-19. Program Desa Pangan Aman ini dapat mendukung pemulihan ekonomi di desa melalui pencapaian target-target pembangunan keberlanjutan di desa.

Intervensi keamanan pangan dalam program Desa Pangan Aman meliputi tahapan: advokasi, pelatihan kader keamanan pangan desa, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain: desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa yang akan dilakukan intervensi keamanan pangan Tahun 2025 direncanakan di Kota Mataram dengan target sebanyak 4 desa/kelurahan dan 6 desa pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2024. Karena adanya efisiensi anggaran, pada tahap I ini hanya ditargetkan 2 desa/kelurahan yang akan diintervensi, yaitu: Kelurahan Babakan dan Kelurahan Ampenan Selatan

Pada Triwulan II tahun 2025 yang ditargetkan dan diukur berupa *progress* pencapaian indikator. Progres pencapaian indikator diperoleh dari keseluruhan masing-masing tahapan kegiatan dengan bobot progress kegiatan yang telah dilaksanakan.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Realisasi dan capaian indikator Jumlah desa pangan aman di Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Target dan progress realisasi Jumlah desa pangan aman

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	% Capaian	Kategori
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	47,00	47,50	101,06%	Sangat Baik

Realisasi *progress* Jumlah desa pangan aman di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 47,50% dari target progress 47,00%, sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 101,06% dengan kategori “sangat baik”.

Rincian pembobotan progress dan realisasi progress Jumlah desa pangan aman di Triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 20 Realisasi progress Jumlah desa pangan aman

No	Kegiatan	Pembobotan Progress (%)	Realisasi (%)
1	Advokasi Lintas Sektor Desa	25,00	25,00
2	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) Batch 1	12,50	12,50
3	Bimtek Komunitas Batch 1	10,00	10,00
4	Pengawalan	10,00	-
5	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) Batch 2	12,50	-
6	Bimtek Komunitas Batch 2	10,00	
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	20,00	
TOTAL (%)		100	47,5

Progress realisasi ini diperoleh dari kegiatan Advokasi Lintas Sektor Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) Batch 1, Bimtek Komunitas Batch 1.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 2	% Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	100% (4)	47,50%	47,50% 	Perlu upaya keras

Penetapan target *progress* indikator Jumlah desa pangan aman pada akhir tahun 2025 sebesar 100% (4 desa). Berdasarkan hasil realisasi Triwulan II tahun 2025, Target akhir Tahun 2025 baru tercapai sebesar 47,50%, sehingga perlu upaya keras agar target akhir Tahun 2025 dapat tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Progress indikator Jumlah desa pangan aman pada Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target disebabkan karena dukungan dan komitmen dari Tim Kerja serta koordinasi yang baik dengan Pemda dalam mengawal pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan perencanaan. Selain itu, Monev secara rutin dan koordinasi intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKSK ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- Pada 20 Maret 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan di Kota Mataram sebagai bagian dari tahapan Advokasi. Kegiatan koordinasi dihadiri oleh Asisten 1, Asisten 2, Kepala Dinas Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kadis Ketahanan Pangan, Plt Kadisperindag, Karo Pemerintahan, dan perwakilan OPD lainnya. Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April 2025 di kantor BBPOM Mataram
- Advokasi Lintas Sektor desa dilaksanakan pada 22 April 2025 terintegrasi dengan Program PRO PN lainnya yaitu sekolah dan pasar pangan aman. Kegiatan dibuka oleh Asisten 1 Kota Mataram H.L. Martawang, SE, MSi, turut hadir pada pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota

Mataram dr. H. Emirald Isfihan, MARS., MH., CMC., FISQua. Dan OPD di lingkup Kota Mataram, Kanwil Kemenag NTB, Kemenag Kota Mataram, Camat Sandubaya dan Camat Ampenan, Lurah Babakan, Lurah Ampenan Selatan, Lurah Sapta Marga, Kepala Pasar ACC dan Kepala Pasar Tanjung Karang, serta para Kepala Sekolah yang menjadi sasaran Intervensi Keamanan Pangan tahun 2024 dan 2025.

- Bimtek Komunitas Batch 1 dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 di Kelurahan Ampenan Selatan, diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari 21 komunitas ibu rumah tangga, 7 komunitas remaja, 7 komunitas sekolah, 5 komunitas pedagang pangan siap saji, 5 komunitas IRTP dan 5 komunitas ritel dan 3 Juni 2025 di Kelurahan Babakan diikuti 50 peserta, yang terdiri dari 21 komunitas ibu rumah tangga, 7 komunitas remaja, 7 komunitas sekolah, 5 komunitas pedagang pangan siap saji, 5 komunitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), serta 5 komunitas ritel.

d. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa yaitu advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan serta monitoring dan evaluasi dan pengawalan.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Pasar yang akan dilakukan intervensi keamanan pangan Tahun 2025 direncanakan di Kota Mataram dengan target sebanyak 1 pasar dan 2 pasar pengawalan yang merupakan

target intervensi tahun 2024. Pasar yang akan diintervensi, yaitu: Pasar Perumnas Mataram. Adanya efisiensi anggaran sehingga PMPU PO sebagai pengampu indikator melakukan penyesuaian tahapan kegiatan.

Pada Triwulan II tahun 2025 yang ditargetkan dan diukur berupa *progress* pencapaian indikator. Progres pencapaian indikator diperoleh dari keseluruhan masing-masing tahapan kegiatan dengan bobot progress kegiatan yang telah dilaksanakan.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Realisasi dan capaian indikator ini di Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Target dan Progres Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW2	Realisasi	% Capaian	Kategori
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70%	70%	100,0% 	Baik

Realisasi *progress* Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 70% dari target 70%, sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 100,0% dengan kategori “baik”.

Rincian pembobotan progress dan realisasi progress Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di Triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 22 Realisasi progress Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

No	Kegiatan	Pembobotan Progress (%)	Realisasi (%)
1	Advokasi Lintas Sektor PPABK	25	25
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25	25
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20	20
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20	-
5	Pengawasan	10	-
TOTAL (%)		100	70

Progress realisasi ini diperoleh dari kegiatan Advokasi Lintas Sektor PPABK, Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar, dan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	% Capaian TW 2	Realisasi TW 1	% Capaian TW 1
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70,00	100,00%	5,0%	100,00%

%Capaian Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada TW 2 sama dengan %capaian TW 1, yaitu sebesar 100%.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 2	% Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100% (1)	70,0%	70,0% 	Akan tercapai

Penetapan target *progress* indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada akhir tahun 2025 sebesar 100,0% (1 pasar). Berdasarkan hasil realisasi di Triwulan II tahun 2025, Target akhir Tahun 2025 baru tercapai sebesar 70%, sehingga perlu upaya keras agar target akhir Tahun 2025 dapat tercapai.

Analisis penyebab peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Progress indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target disebabkan seluruh tahapan kegiatan yang ditargetkan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Hal ini disebabkan karena dukungan dan komitmen dari Tim Kerja serta koordinasi yang baik dengan Pemda dalam mengawal indikator ini. Selain itu, monev secara rutin dan koordinasi intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim Kerja juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKSK ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- Pada 20 Maret 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan di Kota Mataram sebagai bagian dari tahapan Advokasi. Kegiatan koordinasi dihadiri oleh Asisten 1, Asisten 2, Kepala Dinas Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kadis Ketahanan Pangan, Plt Kadisperindag, Karo Pemerintahan, dan perwakilan OPD lainnya. Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April 2025 di kantor BBPOM Mataram.
- Advokasi Lintas Sektor PPABK dilaksanakan pada 22 April 2025 terintegrasi dengan Program PRO PN lainnya yaitu sekolah dan desa pangan aman. Kegiatan dibuka oleh Asisten 1 Kota Mataram H.L. Martawang, SE, MSi, turut hadir pada pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. H. Emirald Isfihan, MARS., MH., CMC., FISQua. Dan OPD di lingkup Kota Mataram, Kanwil Kemenag NTB, Kemenag Kota Mataram, Camat Sandubaya dan Camat Ampenan, Lurah Babakan, Lurah Ampenan Selatan, Lurah Sapta Marga, Kepala Pasar ACC dan Kepala Pasar Tanjung Karang, serta para Kepala Sekolah yang menjadi sasaran Intervensi Keamanan Pangan tahun 2024 dan 2025.
- Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dilaksanakan 15 Mei 2025. Kegiatan diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari Petugas Dinas Perdagangan, Petugas Pengelola Pasar, Paguyuban Pasar, Pedagang Pangan Siap Saji dan Pedagang Sayur Kelling Calon Kader GASPAMAN di Kota Mataram.

Sasaran Kegiatan 5.**Meningkatnya Pendampingan UMKM Dalam Pemenuhan Standar Keamanan Dan Mutu**

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan kelima yaitu **Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.**

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi:**Untuk UMK Pangan Olahan:**

- a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan *Start-up* / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan

- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Cara Perhitungan dan Formula

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = $(A + B + C)/3$

A = Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB : Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

B = jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap : Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

C = Jumlah rekomendasi SPA CPKB : Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3. 23 Target, realisasi dan %capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW 2	Realisasi	% Capaian	Kategori
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	55,0	55	100% 	Baik

Realisasi indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 55% dari target 55,0% dengan persentase capaian 100% dengan kategori “baik”.

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yang baik diperoleh dari nilai rata-rata progress kegiatan pendampingan UMKM OBA, kosmetik dan pangan olahan yang dilakukan.

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3. 24 Target, realisasi dan %capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

No	Jenis Komoditi	Bobot/progress (%)						Progres (%)
		KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Penetapan target UMKM	Bimbingan teknis	Pendampingan UMKM	Sertifikasi	Monev	
1	OBA	-	10	20	10	-	-	40
2	Kosmetik	-	10	20	20	10	-	60
3	Pangan Olahan	5	10	30	20	-	-	65
Rata-rata								55,00

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	% Capaian TW 2	Realisasi TW 1	% Capaian TW 1
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	55	100%	11,67	77,78%

%Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada TW 2 mengalami kenaikan dibandingkan dengan %capaian TW 1, yaitu sebesar 22,22%.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 2	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87,30	55	55% 	Perlu upaya keras

Penetapan target Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan bersifat kumulatif. Berdasarkan realisasi di Triwulan II tahun 2025, target akhir Tahun 2025 baru tercapai 55% sehingga perlu upaya keras agar target indikator ini dapat tercapai di akhir 2025.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan telah mencapai target di Triwulan II tahun 2025. Realisasi tercapai karena telah dilakukan perubahan perencanaan kegiatan (dampak efisiensi anggaran) dan percepatan pendampingan pelaku usaha secara daring untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang ada walaupun tidak sepenuhnya efektif. Selain itu dengan pemberdayaan mahasiswa magang sebagai fasilitator pendamping UMKM serta Monev yang intensif untuk memastikan target tercapai.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. KIE/sosialisasi Keamanan Pangan bagi UMKM Pangan Olahan yang akan didampingi
2. Rapat Koordinasi Penetapan Target UMKM Bersama lintas sektor terkait yang mengikuti program pendampingan.
3. Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi BBPOM di Mataram yang melaksanakan pendampingan kepada UMKM.
4. Pemberdayaan mahasiswa magang sebagai fasilitator pendamping UMKM.

Sasaran Kegiatan 6.**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan keenam hanya satu indikator yaitu **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT**.

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%

Cara Perhitungan dan Formula

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%$$

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3. 25 Target, realisasi dan %capaian Persentase keberhasilan Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW 2	Realisasi	% Capaian	Kategori
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	27,50	33,33	121,21 	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT di Triwulan II tahun 2025 telah melampaui target yaitu sebesar 33,33% dari target 27,50% atau tercapai sebesar 121,21% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”.

Rincian pencapaian target dan realisasi setiap tahap penyelesaian berkas perkara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 26 Target dan realisasi perkara serta keberhasilan penyidikan Triwulan II tahun 2025

UPT	Tahapan	Target Perkara		Realisasi Perkara		Koefisien		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Thn 2025	Carry Over	Thn 2025	Carry Over	Tahun Berjalan	Carry Over					
BBPOM Mataram	SPDP	6		3		1,00		0,15	15,00%	40,00%	83,33%	33,33
	Tahap I			1		0,40	0,00	0,4	16,00%			
	P21					0,20	0,00	0,3	6,00%			
	Tahap II			1		0,20	0,00	0,15	3,00%			
	Total	6	0	5	0							

Di Triwulan II tahun 2025, jumlah kasus yang ditindaklanjuti secara projustitia oleh PPNS BBPOM di mataram sebanyak 5 perkara dari target 6 perkara tahun 2025.

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW 2	% Capaian TW 2	Realisasi TW 1	% Capaian TW 1
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	33,33	121,21%	9,17	100,73%

%Capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada TW 2 mengalami kenaikan dibandingkan dengan %capaian TW 1, yaitu sebesar 20,48%.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 2	% Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92%	33,33	36,23%	Perlu upaya keras

Penetapan target indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT adalah kumulatif. Target pada akhir tahun 2025 sebesar 92,0%. Berdasarkan realisasi di Triwulan II tahun 2025, target tahun 2025 baru tercapai sebesar 36,23% sehingga perlu upaya keras untuk tercapainya target indikator ini di akhir 2025.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan BBPOM di Mataram mencapai target Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT disebabkan karena komitmen Tim PPNS dalam penyelesaian target perkara, selain itu koordinasi yang baik dengan Korwas PPNS dan JPU menjadi faktor penting keberhasilan capaian. Monev secara rutin dan koordinasi intens antara Kepala Balai, Ketua Tim dan Tim PPNS juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKSK ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Perlu strategi untuk mempercepat realisasi output, kinerja dan Anggaran sehingga target tercapai

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Operasi Intelijen sampai TW 2 Tahun 2025;
2. Pelaksanaan Operasi/penindakan pemberantasan kejahatan obat dan makanan;
3. Penyidikan bersama antara PPNS BBPOM di Mataram dengan penyidik kepolisian (Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB dan Satres Narkoba Polres);

Sasaran Kegiatan 7.**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan ketujuh hanya satu indikator yaitu **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.**

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Cara Perhitungan dan Formula

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

1. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
2. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 27 Target dan realisasi perkara serta keberhasilan penyidikan Triwulan II tahun 2025

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW 2	Realisasi	% Capaian	Kategori
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,0% 	Baik

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 50% dari target 50% atau tercapai sebesar 100,0% dengan kategori “baik”.

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW 2	% Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%	50%	55,56% 	Perlu upaya keras

Penetapan target indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar adalah kumulatif. Target pada akhir tahun 2025 sebesar 90,0%. Berdasarkan realisasi di Triwulan II tahun 2025, target tahun 2025 baru tercapai sebesar 55,56% sehingga perlu upaya keras untuk tercapainya target indikator ini di akhir 2025.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan BBPOM di Mataram mencapai target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Triwulan II 2025 disebabkan dukungan dan komitmen Ketua Tim dan Tim Kerja Penindakan melaksanakan patroli siber, profiling dan tindak lanjut / verifikasi data hasil patroli siber serta profiling ke lapangan meskipun ada efesiensi anggaran pada rincian output (RO) yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Selain itu pelaksanaan Monev secara rutin dan koordinasi intens antara Ka Balai, Ketua Tim kerja dan Tim PPNS juga menjadi faktor keberhasilan capaian IKSK ini.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Patrol siber setiap bulan Januari - Juni 2025 terhadap link/tautan yang menjual sediaan farmasi dan pangan olahan TIE di market place dan direkomendasikan untuk dilakukan takedown melalui inawebcrawler.
2. Pelaporan profiling terhadap link dengan penjualan besar melalui Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) bulan Januari-Juni 2025.
3. Pemutakhiran peta rawan kasus pada Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) bulan Januari-Juni 2025 dengan mengambil data dari hasil pendalaman informasi/kegiatan penindakan/pengawasan/informasi masyarakat/media/temuan kasus dari kepolisian.

Sasaran Kegiatan 8.
Layanan Publik UPT yang prima

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan kedelapan hanya satu indikator yaitu **Indeks Pelayanan Publik UPT**.

Indeks pelayanan publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan pelayanan (24%)
- Profesionalitas SDM (25%)
- Sarana prasarana (18%)
- Sistem informasi pelayanan publik (11%)
- Konsultasi dan pengaduan (10%)
- Inovasi (12%)

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Cara Perhitungan dan Formula

penilaian indeks dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

a. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup <i>(Dengan Catatan)</i>
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik <i>(Dengan Catatan)</i>
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pengukuran capaian indikator kinerja serta analisis capaian indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan 8 ditargetkan akan dilakukan pada akhir Triwulan IV atau akhir tahun 2025 dengan target 4,70.

Sasaran Kegiatan 9.**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**

Pada Sasaran Kegiatan kesembilan ini terdapat 4 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan ini yaitu :

Tabel 3. 28 Target dan realisasi perkara serta keberhasilan penyidikan Triwulan II tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,0
Nilai AKIP UPT BPOM	83,90
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,0
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05

Pengukuran capaian indikator kinerja serta analisis capaian indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan kesembilan akan dilakukan pada akhir Triwulan IV atau akhir tahun 2025.

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Cara Perhitungan dan Formula

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

2. Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP (5) Capaian Kinerja.

Bobot Penilaian masing- masing komponen AKIP

Komponen Yang Dinilai		Bobot (%)
a.	Perencanaan Kinerja	24
b.	Pengukuran Kinerja	24
c.	Pelaporan Kinerja	12
d.	Evaluasi Internal	20
e.	Capaian Kinerja	20

3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)

2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara Perhitungan dan Formula

Nilai Kinerja Anggaran =

$(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Cara Perhitungan dan Formula

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = Skor Total : 16

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

III.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terbatas dalam melakukan sampling OBA bentuk sediaan serbuk dan kapsul karena reagen untuk uji aflatoxin masih dalam proses pengadaan, sementara di peredaran bentuk sediaan OBA sebagian besar serbuk dan kapsul	Agar Pejabat Pengadaan memastikan ketersediaan reagen yang baru bisa terpenuhi di bulan September	TW 3	-	Agar Pejabat Pengadaan memastikan ketersediaan reagen yang baru bisa terpenuhi di bulan September	TW 3	
		Kemampuan uji lab regional (Surabaya dan Semarang) sangat rendah, sehingga sampel tidak bervariasi	Koordinasi dengan Lab Surabaya dan Kupang untuk menambah kemampuan uji	TW 2	Koordinasi dengan Lab Surabaya dan Kupang untuk menambah kemampuan uji, namun belum bisa dilakukan karena keterbatasan reagensia	-	TW 2	Close/ Kemampuan Uji Lab Regional tetap rendah

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Prioritas lebih diberikan pada pelayanan kuratif dibanding pelaporan insiden atau efek samping dan Kurangnya evaluasi rutin atau pembinaan dari UPT terhadap fasilitas pelayanan kesehatan terkait pelaporan	Menunjuk PIC atau tim farmakovigilans di masing-masing fasyankes agar tanggung jawab pelaporan lebih jelas	TW 2	Menunjuk PIC atau tim farmakovigilans di masingmasing fasyankes agar tanggung jawab pelaporan lebih jelas			Close/ sudah terdapat PIC yang di tunjuk masing-masing fasyankes
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Adanya kebijakan anggaran pada TW I (efisiensi) sehingga dilakukan penundaan pengadaan reagensia, namun pada awal TW2 dilakukan relaksasi anggaran sampling dan pengujian	Proses pengadaan reagensia dapat segera direalisasikan sehingga pada TW II (pagu relaksasi) seluruh sampel pangan dapat disampling dan diuji sesuai dengan pedoman sampling	Juni 2025	- Proses pengadaan reagensia sudah dilakukan pada TW II (pagu relaksasi) sehingga di harapkan seluruh sampel pangan dapat disampling dan diuji sesuai dengan pedoman sampling - Melakukan monev setiap bulan untuk	-	-	Close/ pengadaan reagensia telah di proses

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
					memastikan renlak sampling dan pengujian telah dilakukan sesuai Pedoman Sampling			
		Proses perbaikan ICP sampai dengan pertengahan Juni sehingga terjadi antrian sampel dari bulan sebelumnya yang belum selesai diuji khususnya paramater logam berat	Perbaikan instrumen ICP segera diselesaikan dan pengujian menggunakan metoda analisa alternatif	TW 3		-Memonitor progres perbaikan dengan vendor dan mempelajari maintenance yang memungkinkan dilakukan petugas lab untuk memperbaiki kerusakan ringan - Berkoordinasi dengan P3OMN untuk menggunakan metoda analisa alternatif	TW 3	
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Adanya perubahan kebijakan anggaran pada TW I (efisiensi dan relaksasi) realisasi sampel tidak sesuai perencanaan dan pedoman sampling (seharusnya sudah selesai disampling dan diuji pada TW I)	Renlak sampling dan pengujian disesuaikan dengan ketersediaan reagensia agar seluruh sampel dapat diuji dengan parameter uji wajib	TW 2	-Menyusun kembali renlak sampling dan pengujian sampel PIRT sehingga kekurangan sampel PIRT yang seharusnya sudah selesai disampling dan diuji pada TW I (sesuai ketentuan PS) dapat terealisasi pada TW II -Pelaksanaan sampling kekurangan sampel PIRT			Renlak sampling telah disesuaikan dan sampling sampel PIRT telah tercapai sesuai target.
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi/ desk CAPA kepada pelaku usaha berjalan cukup baik	Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi/desk CAPA kepada pelaku usaha secara rutin	Septem ber 2025	Monitoring CAPA telah dilaksanakan secara online, baik melalui gdrive dan komunikasi melalui no WA layanan konsultasi	Kegiatan Desk CAPA secara offline belum dilaksanakan	Septem ber 2025	
		koordinasi dengan lintas sektor berjalan cukup baik	Melakukan koordinasi secara rutin dengan lintas sektor baik dalam rangka DAK maupun pengawasan Obat dan Makanan secara daring maupun luring sehingga pengawasan dapat berjalan efektif.	Decem ber 2025	kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: audiensi ke Gubernur NTB, Walikota Mataram; pengawasan bersama lintas sektor	Monev DAK TW II (bulan Juli 2025), TW III (Oktober 2025), TW IV (Desember - Februari 2026)	Decem ber 2025	

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
					dlm intensifikasi pengawasan pangan ramadhan idul fitri; pengawalan program MBG, monev DAK TW I Tahun 2025 (25 April 2025)			
		koordinasi dengan lintas sektor berjalan cukup baik	Melakukan komunikasi yang intensif baik secara formal maupun informal dalam pembahasan feedback tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana Obat dan Makanan.	Decem ber 2025		Melaksanakan komunikasi dengan linsek terkait telah dilakukan secara intensif melalui WAG, zoom meeting (monev DAK TW I Tahun 2025) dan secara langsung dlm rangka monev feedback tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Decem ber 2025	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	banyaknya kegiatan pusat via zoom yang melibatkan personel sehingga jadwal pengawasan harus disesuaikan dengan agenda masing masing personel dan	koordinasi dengan internal terkait penyesuaian kalender kegiatan pengawasan	TW 2	koordinasi dengan ketua tim lainnya untuk menyesuaikan rencana dengan personel yang terlibat	-	-	Close/ Sudah dilakukan penyesuaian rencana

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
		agenda pengawasan sarana lainnya						
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Dengan dibukanya blokir anggaran yang secara otomatis menyebabkan target dikembalikan ke target awal membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terutama terkait penyusunan target dan personel yang bertugas untuk dapat mengejar ketertinggalan	koordinasi dengan internal terkait penyesuaian kalender kegiatan pengawasan	TW 2	koordinasi dengan ketua tim lainnya untuk menyesuaikan rencana dengan personel yang terlibat	-	-	Close/ Sudah dilakukan penyesuaian rencana

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Dari hasil evaluasi pusat via SIPT, terdapat peningkatan ketidaksesuaian tindak lanjut yang diberikan oleh UPT untuk sarana Apotek.	Perlu adanya penyamaan persepsi antara tim evaluator pusat dengan UPT, mengingat pola tindak lanjut yang dilakukan telah diterapkan sejak 2024 dan hasil evaluasi kesesuaian TL untuk sarana Apotek di tahun 2024 adalah seluruhnya dinyatakan sesuai.	TW 3		Akan diusulkan agar dapat dilakukan pembahasan bersama tim evaluator pusat dan UPT terkait analisa penetapan tindak lanjut terutama untuk sarana Apotek	TW 3	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	berdasarkan hasil monev terapat petugs yang salah dalam menentukan tindak lanjut sehingga mempengaruhi hasil perhitungan capaian	peningkatan pengetahuan petugas tentang pedoman tindak lanjut	TW 3		melakukan sosialisasi kepada petugas terkait pedoman tindak lanjut	TW 3	
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Adanya perbedaan cara perhitungan indikator yang terdapat dalam RAPK dengan target yang ditetapkan dalam SE iklan PO, dimana proporsi	Berkoordinasi dengan unit pengampu (DitwasDar PO) agar menyesuaikan tools perhitungan capaian di RAPK dengan SE sehingga parameter kesesuaian proporsi media dapat tercapai 100%	TW 3	- Melakukan monev setiap bulan agar target dapat tercapai	- Kecenderungan pencapaian IKSK iklan lebih dari 110% setiap bulannya, sehingga diusulkan untuk menaikkan target indikator agar capaian masih dapat dinilai (<110%)	TW 3	

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
		media ditetapkan untuk setahun sedangkan perhitungan proporsi media dalam RAPK dihitung untuk tiap bulan yang menyebabkan capaian untuk perhitungan kesesuaian proporsi media kurang dari 100%						
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian realisasi target pada B1-B3 yang tidak tercapai akibat kesalahan perhitungan breakdown target	- Usulan revisi target - Pemeriksaan 2 (dua) sarana produksi MGS akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli	TW 2	Usulan revisi target RAPK telah dietujui oleh Biro Renkeu dengan surat no. PR.07.21.06.25.219 tanggal 25 Juni 2025 dimana target pada B4-B7 telah direvisi menjadi 37,5 sehingga target dapat tercapai 100%	-	-	Close/ Telah dilakukan revisi target RAPK sejak TW 2 sehingga realisasi mencapai target

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai Persentase Pemenuhan Standar Peralatan Tahun 2024 91,74%	Memenuhi kebutuhan dan pemeliharaan peralatan sesuai standar yang telah ditetapkan	Decem ber 2025	Telah melakukan pengadaan alat lab kimia untuk memenuhi kebutuhan peralatan sesuai standar yaitu: HPLC, Automatic Destilasi, Inkubator, Anaerobic Jar, Mikroskop, AW Meter, Mikropipet, dan Particle Counter serta melakukan pemeliharaan oleh dokter alat lab seperti HPLC dalam mendukung implementasi Inovasi I-CONIC	Pemenuhan Pengadaan alat laboratorium pendukung untuk laboratorium mikrobiologi lainnya. Serta melakukan Preventive Maintenance untuk alat lab utama seperti HPLC, AAS, GC-MS dan ICP-MS	TW 3	
		Nilai Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi 98,87	Melaksanakan program pelatihan yang terstruktur berdasarkan GAP analisis identifikasi kebutuhan pelatihan terhadap standar kompetensi	TW 3		Peningkatan kompetensi personil pengujian secara Kimia dan Mikrobiologi akan dilaksanakan pada TW 2 dan TW 3 tahun 2025	TW 3	

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
		Terbatasnya anggaran dan ketersediaan sampel obat untuk pemenuhan sampel dalam rangka pemenuhan Standar Ruang Lingkup Tahun 2025	Optimalisasi anggaran dan penyesuaian sampel rutin untuk mendukung pemenuhan sampel ruang lingkup.	TW 2	Berkoordinasi dengan fungsi inspeksi/sampling dalam penyusunan perencanaan sampling sampel obat rutin untuk mendukung pemenuhan sampel ruang lingkup	-	-	Sampling beberapa sampel dalam rangka pemenuhan SRL telah terpenuhi
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai Indeks pemahaman pada audiens survey media sebesar 3,349 (83,72%)	Menggunakan media visual seperti gambar, infografik, video singkat, atau ilustrasi yang mudah dipahami, terutama untuk kelompok yang kesulitan membaca	TW 2	Melibatkan tim medsos dalam pembuatan Infografik sederhana dengan memperbanyak gambar/ilustrasi besar dan sedikit teks. Pembuatan video pendek (durasi 1–2 menit) dengan narasi suara.		-	Nilai Indeks pemahaman pada audiens survey media sebesar 3,349 (83,72%)

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	koordinasi dengan pemerintah daerah belum optimal	Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dengan mengusulkan agar sekolah yang menjadi lokus intervensi ditetapkan sebagai percontohan melalui SK Kepala Daerah. Selain itu, keterlibatan Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan dalam berbagai kegiatan juga perlu ditingkatkan guna memastikan program berjalan lebih optimal	TW 3	Melibatkan tim medsos dalam pembuatan Infografik sederhana dengan memperbanyak gambar/ilustrasi besar dan sedikit teks. Pembuatan video pendek (durasi 1–2 menit) dengan narasi suara.	Bersurat ke Pemda dan menyiapkan draft SK	TW 3	
		Dukungan dari pemerintah daerah belum optimal	Mendorong sinergisme program dari OPD terkait untuk mendukung implementasi program PJAS Aman dapat berjalan dengan baik. Dukungan dari pemerintah daerah dapat juga diwujudkan pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana, sehingga terwujud lingkungan Sekolah yang bersih dan sehat	TW 2	Meyiapkan dokumen komitmen bersama lintas sektor terkait implementasi, keberlanjutan dan replikasi Pro-PN saat bersamaan kegiatan advokasi		-	Dukungan dari pemerintah daerah belum optimal

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
		Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan kegiatan belum optimal	Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan kegiatan guna mengatasi kendala jarak dan keterbatasan sumber daya manusia melalui pembentukan WAG desa dan penggunaan media zoom untuk pembahasan setiap tahapan program	TW 2	Membentuk WAG Sekolah intervensi dan memanfaatkan media zoom		-	Pemanfaata n Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan kegiatan makin optimal
		Koordinasi sudah baik namun Pemda belum optimal memberikan dukungan alokasi anggaran untuk mereplikasi program program PJAS Aman.	Pengutan advokasi dan audiensi dengan Kepala Daerah, Kepala OPD, koordinasi dengan Bappeda Kab / Kota agar BBPOM di Mataram dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang	TW 2	Melakukan audensi dengan Kepala Daerah, Kepala OPD dan bersurat ke Bappeda Kab / Kota agar BBPOM di Mataram dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang		-	Belum ada dukungan alokasi anggaran untuk mereplikasi program program PJAS Aman.
16	Jumlah desa pangan aman	program Desa Pangan Aman belum direplikasi secara mandiri oleh Pemda	Mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasi dan mengimplementasikan program Desa Pangan Aman secara mandiri	TW 2	Meyiapkan dokumen komitmen bersama lintas sektor terkait implementasi, keberlanjutan dan replikasi Pro-PN		-	program Desa Pangan Aman belum direplikasi secara mandiri oleh Pemda

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
		pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) belum optimal	Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan kegiatan guna mengatasi kendala jarak dan keterbatasan sumber daya manusia melalui pembentukan WAG desa dan penggunaan media zoom untuk pembahasan setiap tahapan program	TW 2	Membentuk WAG Desa/Kelurahan dan memanfaatkan media zoom			pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) makin optimal
		Materi keamanan pangan relative sulit dipahami dan diterapkan oleh beberapa kader serta komunitas desa tertentu	Menyesuaikan metode penyampaian materi keamanan pangan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh kader serta komunitas desa.	TW 2	Menyusun materi keamanan pangan dengan lebih banyak gambar-gambar			Materi keamanan pangan relative mudah dipahami dan diterapkan oleh beberapa kader serta komunitas desa tertentu
			Melakukan pengawalan terhadap desa yang telah diintervensi agar dapat mempertahankan dan menjalankan program Desa Pangan Aman secara mandiri	July 2025		Melakukan pengawalan terhadap desa yang telah diintervensi Bersurat ke Pemda	July 2025	

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
		koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan berbagai program di desa belum sepenuhnya berjalan	Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan berbagai program di desa, seperti Kampung KB (BKKBN), Kampung Sehat (POLRI), dan Desa Bersinar (BNN).	TW 2	Koordinasi ke Linsek terkait		-	koordinasi lintas sektor telah dilaksanakan namun penyalarkannya program di desa belum sepenuhnya berjalan
		Koordinasi sudah baik namun Pemda belum optimal memberikan dukungan alokasi anggaran untuk mereplikasi program Desa Pangan Aman.	Pengutan advokasi dan audiensi dengan Kepala Daerah, Kepala OPD, koordinasi dengan Bappeda Kab / Kota agar BBPOM di Mataram dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang	TW 2	Melakukan audensi dengan Kepala Daerah, Kepala OPD dan bersurat ke Bappeda Kab / Kota agar BBPOM di Mataram dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang		-	Pemda masih belum memberikan dukungan alokasi anggaran untuk mereplikasi program Desa Pangan Aman.
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	program pasar pangan aman belum direplikasi secara mandiri oleh Pemda	Mendorong pemerintah daerah melakukan replikasi kegiatan ke pasar lain yang belum mendapat intervensi program dari BBPOM di Mataram melalui SK Kepala Daerah beserta alokasi anggarannya untuk pengadaan rapid test kit, dll	TW 3		Bersurat ke Pemda dan menyiapkan draft SK	TW 3	

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
		implementasi program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas belum sepenuhnya sinergi dengan program dari OPD terkait	Mendorong sinergisme program dari OPD terkait untuk mendukung implementasi program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas dapat berjalan dengan baik. Dukungan dari pemerintah daerah dapat juga diwujudkan pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana pasar, sehingga terwujud lingkungan pasar yang bersih dan sehat	TW 2	Meyiapkan dokumen komitmen bersama lintas sektor terkait implementasi, keberlanjutan dan replikasi Pro-PN		-	implementasi program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas belum sepenuhnya sinergi dengan program dari OPD terkait
		Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) belum optimal	Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan kegiatan guna mengatasi kendala jarak dan keterbatasan sumber daya manusia melalui pembentukan WAG desa dan penggunaan media zoom untuk pembahasan setiap tahapan program	TW 2	Membentuk WAG pasar intervensi dan memanfaatkan media zoom			Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) makin optimal
		Koordinasi sudah baik namun Pemda belum optimal memberikan dukungan alokasi anggaran untuk mereplikasi	Pengutan advokasi dan audiensi dengan Kepala Daerah, Kepala OPD, koordinasi dengan Bappeda Kab / Kota agar BBPOM di Mataram dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang	TW 2	Melakukan audensi dengan Kepala Daerah, Kepala OPD dan bersurat ke Bappeda Kab / Kota agar BBPOM di Mataram dilibatkan dalam kegiatan		-	Pemda belum memberikan dukungan alokasi anggaran untuk mereplikasi

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
		program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas			Musrenbang			program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Implementasi inovasi Gemilang Pro-UMKM belum dilakukan secara digital	Memperkuat inovasi Gemilang Pro-UMKM dengan digitalisasi sehingga pemantauan pelaksanaan pendampingan menjadi lebih mudah	TW 3		Penyusunan rencana pengembangan dan integrasi fitur dalam subsite BBPOM Mataram	TW 3	
		Belum seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Lombok terbangun jejaring sinergitas dengan unsur pentahelix	Memperluas jejaring sinergitas dengan unsur pentahelix yang ada di masing-masing kabupaten/kota	Dese mber 2025		Koordinasi lintas sektor dengan unsur pentahelix di Kabupaten/Kota	Desem ber 2025	
		jumlah fasilitator yang berasal dari mahasiswa masih terbatas	Menambah jumlah fasilitator yang berasal dari mahasiswa dengan mekanisme pengabdian Masyarakat/KKN	Septe mber 2025		Pengintegrasi pelaksanaan program SAPA Kampus dari Direktorat PMPU Pangan Olahan dan Magang/PKL MBKM dari Universitas dengan tahapan pendampingan UMKM	Septe mber 2025	

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
		Adanya efisiensi anggaran sehingga dilakukan penyesuaian target pendampingan. Selain itu, perubahan manual indikator untuk pangan olahan yang baru disosialisasikan pada bulan Maret sehingga tahapan pendampingan perlu disesuaikan	Penyusunan prioritas target pendampingan dengan memanfaatkan pelaksanaan pendampingan terutama untuk pangan olahan dengan mengintegrasikan ke program kegiatan lain yang tidak memerlukan dukungan anggaran seperti SAPA KAMPUS. Penyesuaian tahapan pendampingan disesuaikan dengan manual indikator terbaru waktu yang tersisa	TW 2	Menyusun pedoman pendampingan dan melakukan monitoring pelaksanaannya serta percepatan tahapan dengan sinergi kegiatan yang tidak membutuhkan dukungan anggaran		-	Telah dilakukan penyesuaian target pendamping an
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Peningkatan kompetensi petugas belum seluruhnya dilakukan dan belum efektif karena masih online	Peningkatan kompetensi personel di fungsi penindakan di Mataram terutama terkait dengan cybercrime, pembentukan/ pembinaan jaringan serta kemampuan komunikasi untuk pengungkapan perkara sampai pada aktor intelektualnya	Decem ber 2025	peningkatan kompetensi yang mellui media pembejaraan online (IDEAS)	peningkatan kompetensi petugas offline baik dengan mengirim petugas atau mendatangkan narasumber yang kompeten terkait Cybercrime, Tukbinjar dan komunikasi	Decem ber 2025	

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
		Penggalangan kepada <i>stakeholders</i> yang dilakukan sangat terbatas	Penguatan penggalangan kepada stakeholders untuk mendapatkan informasi kejahatan obat dan makanan	Dece mber 2025	Penggalangan dengan JPU untulk percepatan penyelsaian perkara, penggalangan dengan Informan/agen dalam mendapatkan informasi yang sifatnya A1	Penggalanagan yang sifatnya luas, komprehensif dan menyasar stakeholder untuk mendpatkan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan kejahatan obat dan makanan	Decem ber 2025	
		Target Jumlah perkara belum disesuaikan akibat Adanya efisiensi dan relaksasi anggaran di TW1 2025	Melakukan penyesuain target, dan perlu strategi untuk mempercepat realisasi output, kinerja dan anggaran	TW 2	-Menyusun perencanaan target perkara dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang direlaksasi -intensifikasi kegiatan/operasi intelijen, penggalangan, rekrut agen/informan sehingga didapat informasi A1 yg bisa dijadikan target operasi/penindakan		-	Target jumlah perkara telah disesuaikan

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi	pelaksanaan patrol siber khususnya verifikasi data hasil patroli siber dan profiling dapat dilakukan bersama-sama dengan kegiatan penyelidikan pada rincian output (RO) perkara yang seluruh anggarannya telah dapat digunakan Kembali	TW 2	Melaksanakan kegiatan verifikasi data hasil pelaksanaan patroli cyber/ profiling dan Pulbaket bersamaan dengan kegiatan inteligen		-	Anggaran masih terkena efisiensi
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Monev peningkatan dan pemenuhan sarana pelayanan publik sesuai standar belum dilakukan secara berkala	Melakukan monev secara berkala untuk peningkatan dan pemenuhan sarana pelayanan publik sesuai standar	TW4 2025	Melakukan Monev peningkatan dan pemenuhan sarana pelayanan publik sesuai standar TW1 2025	Melakukan Monev peningkatan dan pemenuhan sarana pelayanan publik sesuai standar TW2, TW3 dan TW4 2025	TW4 2025	
		rencana tindak lanjut untuk SKM secara mandiri belum dirumuskan per-bulan	Merumuskan rencana tindak lanjut untuk SKM secara mandiri (per-bulan) sebagai tahapan-tahapan pendek untuk menuju hasil utama yang ingin diperbaiki dalam jangka panjang, sehingga proses penyelesaian TL dapat selesai 100% pada bulan berikutnya	TW4 2025	Merumuskan rencana tindak lanjut untuk SKM secara mandiri bulan Jan-Maret 2025	Merumuskan rencana tindak lanjut untuk SKM secara mandiri bulan April-Desember 2025	TW4 2025	

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelime	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	capaian komponen pengungkit dan komponen hasil belum maksimal	Meningkatkan komitmen pimpinan dan koordinasi dari setiap Pokja RB untuk mendukung peningkatan capaian komponen pengungkit dan komponen hasil secara maksimal		Peningkatan komitmen pimpinan dan koordinasi semua elemen BBPOM di Mataram melalui kegiatan Upacara Luring, senam, lomba-lomba, ,, bimtek ZI dengan insektorat 2, dan kegiatan bersama lainnya	capacity building	Desember 2025	
		monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI belum optimal	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI secara berkala dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Penilai Internal		Monev TW 1 (jan-maret 2025) dan sudah melengkapi kekurangan data dukung /rekomendasi hasil penialain Auditor internal terhadap LKE ZI	Monev TW2, TW3, TW 4 2025	Desember 2025	
23	Nilai AKIP UPT BPOM	Beberapa data Pada Lakin Interim 2024 belum disajikan sesuai pedoman	Menyusun Laporan Kinerja interim dengan menyajikan: a. Narasi analisis terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran; b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya;	TW3 2025	Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan al.: a) Narasi analisis terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran; b) Monitoring atas	Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan Perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya;	TW3 2025	

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
			c. Monitoring atas rekomendasi/rencana aksi laporan kinerja secara memadai.		rekomendasi/ rencana aksi			
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai aspek efisiensi EKA yaitu efisiensi SBKK/SBKU: 0	1. Nilai EKA Meningkatkan aspek nilai efisiensi yaitu efisiensi anggaran khususnya Rincian Output (RO) SBKK tetap dalam rentang 100-120%	Des 2025		Melakukan Monev untuk menjaga Nilai aspek efisiensi EKA yaitu efisiensi SBKK/SBKU dalam rentang 100-120%	Des 2025	
		Nilai IKPA 99,81	2. Nilai IKPA - Meningkatkan konsistensi antara perencanaan (Plan of Action), pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA. - Meningkatkan monitoring pelaksanaan Ganti Uang Persediaan (GUP) sehingga GUP dilaksanakan minimal 1 bulan (30 hari) dihitung dari GUP terakhir. - Menjaga penyerapan anggaran tiap jenis belania tiap triwulan	Des 2025		Melakukan Monev bulanan untuk memastikan agar seluruh parameter pendukung Nilai IKPA sd akhir 2025 diperoleh maksimal	Des 2025	

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeli ne	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time Line	
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-

III.3. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja tahun 2024 dan Laporan Interim TW 1 2025 telah dijadikan acuan untuk perbaikan secara terus menerus guna peningkatan kinerja baik melalui informasi kinerja maupun rekomendasi tindak lanjutnya antara lain:

1. Sebagai baseline data untuk pengusulan target kinerja pada Renstra 2025-2029 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 khususnya untuk indikator kinerja yang masih sama dengan indikator Renstra periode 2020-2024.
2. Sebagai baseline data untuk pengusulan perubahan target RAPK 7 IKSK dari TW 2 hingga TW 4 2025.
3. Telah dilakukan tindak lanjut rekomendasi pada Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja interim TW 1 2025 sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja pada Triwulan III maupun di akhir tahun 2025.

III.4 Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025

Pada tahun 2025 BBPOM di Mataram memperoleh anggaran sesuai DIPA awal sebesar Rp.20.815.994.000, bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2025 SP DIPA-063.01.2.432960/2025 tanggal 02 Desember 2024.

Pada Triwulan II tahun 2025 dilakukan efisiensi/blokir anggaran sebesar Rp.3.594.713.000 atau sebesar 17,39% dari total anggaran. Anggaran yang diblokir berasal dari jenis belanja barang (16,06% dari belanja barang) dan belanja modal (1,20% dari belanja modal).

Realisasi anggaran di Triwulan II tahun 2025 adalah Rp. 9.455.099.519 atau sebesar 45,42% terhadap seluruh pagu anggaran atau 54,90% terhadap pagu anggaran dikurangi blokir. Sumbangan terbesar terhadap realisasi anggaran ini yaitu realisasi belanja modal (91,07%) dan belanja pegawai (52,26%).

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3. 29 Realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja Triwulan II tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU TOTAL (Rp)	PAGU SETELAH BLOKIR	REALISASI (Rp)	REALISASI %	
					Per Pagu Total	Per Pagu Setelah Blokir
1	BELANJA PEGAWAI	5,987,925,000	5,987,925,000	3,129,563,035	52.26	52.26
2	BELANJA BARANG	10,935,585,000	7,591,549,000	3,009,061,366	27.52	39.64
3	BELANJA MODAL	3,892,484,000	3,641,807,000	3,316,475,118	85.20	91.07
TOTAL		20,815,994,000	17,221,281,000	9,455,099,519	45.42	54.90

Pengelolaan anggaran BBPOM di Mataram senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Capaian kinerja dan Realisasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis BBPOM di Mataram sampai Triwulan II tahun 2025 seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

2. Realisasi kinerja Masing-masing Indikator dan Sasaran Kegiatan dibandingkan dengan realisasi anggaran

Tabel 3. 30 Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan BBPOM di Mataram sampai Triwulan II tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Kinerja/Output				Anggaran		
		Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d*100)$	g	h	$i=(h/g*100)$
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT				73,55	981,037,951	503,067,950	51.28
	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,5	86.5	95.54	110.45	346931500	326320530	94.06

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Kinerja/Output				Anggaran		
		Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d*100)$	g	h	$i=(h/g*100)$
	2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	0.00	24369000	3750000	15.39
	3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	97.08	114.21	144111544	18680145	12.96
	4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100.00	144111544	18680145	12.96
	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117.65	96074363	12453430	12.96
	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98,8	35	36.67	104.77	3841250	3024250	78.73
	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	100	109.89	3841250	3024250	78.73
	8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	93.33	109.80	3841250	3024250	78.73
	9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96	96	98.62	102.73	105037500	55543350	52.88
	10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	97.92	130.56	105037500	55543350	52.88
	11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,2	84.2	102.28	121.47	3841250	3024250	78.73
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi				100.00	3,180,000	2,680,000	84.28
	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63	37.5	37.5	100.00	3180000	2680000	84.28

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Kinerja/Output				Anggaran		
		Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d*100)$	g	h	$i=(h/g*100)$
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT				105.35	4,353,473,500	3,735,436,020	85.80
	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81,7	81.25	85.6	105.35	4353473500	3735436020	85.80
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT				103,17	826,658,400	729,536,180	88.25
	14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,57	88.57	94.48	106.67	80325400	667117180	830.52
	15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	49	49.23	100.47	303297000	14580000	4.81
	16. Jumlah desa pangan aman	4	45	47.5	105.56	354104000	37512000	10.59
	17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	70	70	100.00	88932000	10327000	11.61
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu				100.00	47,230,000	8,760,000	18.55
	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87,3	55	55	100.00	47230000	8760000	18.55
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT				121.20	238,376,000	121,483,720	50.96
	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	27.5	33.33	121.20	238376000	121483720	50.96
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT				100.00	50,116,000	5,890,000	11.75
	20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100.00	50116000	5890000	11.75

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Kinerja/Output				Anggaran		
		Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d*100)$	g	h	$i=(h/g*100)$
8	Layanan Publik UPT yang prima				-	38,353,000	4,020,000	10.48
	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-	0.00	38353000	4020000	10.48
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal				-	5,788,389,980	4,344,225,652	75.05
	22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	-	-	0.00	1447097495	1086056413	75.05
	23. Nilai AKIP UPT BPOM	83,9	-	-	0.00	1447097495	1086056413	75.05
	24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	0.00	1447097495	1086056413	75.05
	25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05	-	-	0.00	1447097495	1086056413	75.05

Realisasi anggaran tertinggi adalah pada sasaran kegiatan 10 “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” dengan persentase realisasi anggaran 100,00% dan persentase capaian kinerja sasaran sebesar 100,39%. Sedangkan realisasi anggaran terendah adalah pada sasaran kegiatan 4 yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT” dengan persentase realisasi anggaran 99,95% dan persentase capaian kinerja sasaran 103,59%.

Realisasi anggaran tertinggi adalah pada indikator kinerja 29 “Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP” dengan persentase capaian 100,% dan persentase capaian kinerja indikator sebesar 100,78%. Sedangkan realisasi anggaran terendah adalah pada indikator kinerja 15 yaitu “Indeks Pelayanan Publik” dan 16 "Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik" masing-masing dengan persentase realisasi anggaran 99,94% dan persentase capaian kinerja indikator masing-masing sebesar 100,20% dan 101,98%.

Terdapat 5 (lima) indikator yang target kinerjanya akan diukur hanya pada akhir tahun (bulan desember 2025) yaitu: Indeks Pelayanan Publik UPT realisasi anggaran sebesar

10,48%, Nilai Pembangunan ZI UPT dengan realisasi anggaran sebesar 75,05 %, Nilai AKIP UPT dengan realisasi anggaran sebesar 75,05%, Nilai Kinerja Anggaran UPT dengan realisasi anggaran sebesar 75,05% dan Indeks Manajemen Risiko UPT dengan realisasi anggaran sebesar 75,05%, serta Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dengan realisasi anggaran 15,39%.

3. Realisasi anggaran per Kegiatan (Rincian Output)

Tabel 3. 31 Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran masing-masing kegiatan (Rincian Output) sampai Triwulan II Tahun 2025

No.	Rincian Output (RO)		Anggaran		
			Pagu Total (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b		c	d	e= (d/c*100)
1	AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	152.822.000	5.890.000	3,85
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	126.033.000	4.020.000	3,18
3	BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	752.411.000	661.087.180	87,86
4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	818.000.000	44.698.093	5,46
5	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	96.067.000	6.030.000	6,27
6	CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	150.000.000	0	0
7	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100.000.000	0	0
8	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1.335.853.000	418.960.902	31,36
9	QCD.U52	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MATARAM	735.132.000	121.483.720	16,52
10	QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	262.510.000	14.580.000	5,55
11	QDB.002	Desa Pangan Aman	355.544.000	37.512.000	10,55
12	QDB.003	Pasar Pangan aman berbasis komunitas	150.255.000	10.327.000	6,87
13	QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45.700.000	3.750.000	8,20
14	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	93.032.000	8.760.000	9,41

No.	Rincian Output (RO)		Anggaran		
			Pagu Total (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b		c	d	e= (d/c*100)
15	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	565.681.000	49.813.719	8,80
16	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	694.660.000	326.320.530	46,97
17	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	64.830.000	12.097.000	18,65
18	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang Diperiksa oleh UPT	7.651.000	2.680.000	35,02
19	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	582.011.000	111.086.700	19,08
20	RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	3.642.484.000	3.316.475.118	91,04
21	EBA 956	Layanan BMN	8.000.000	3.046.804	38,08
22	EBA.994	Layanan Perkantoran	10.077.318.000	4.296.480.753	42,63

Dari tabel 3.31 dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran pada 2 rincian output (RO) lebih 50% dan 20 RO lainnya kurang dari 50%. Persentase realisasi tertinggi adalah pada rincian output RAB.001 Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai standar kemampuan laboratorium dengan persentase realisasi 91,04%. Sedangkan capaian terendah adalah pada rincian output CAB.002, CAN.001 dengan persentase realisasi 0,0% disebabkan karena seluruh anggarannya diblokir/diefisiensi. Masih relative rendahnya persentase realisasi anggaran pada beberapa kegiatan/RO disebabkan karena adanya efisiensi anggaran karena perhitungan realisasi anggaran tersebut dibandingkan dengan total anggaran termasuk anggaran yang diefisiensi.

4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output

yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Kriteria:

- Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1

- Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak Efisien
2	$0 - 0,2$	100% (efisien)
3	$0,21 - 0,4$	95% (efisien)
4	$0,41 - 0,6$	92% (efisien)
5	$0,61 - 0,8$	90% (efisien)
6	$0,81 - 1,0$	88% (efisien)
7	$1,01 - 1,2$	86% (tidak efisien)
8	$1,21 - 1,4$	84% (tidak efisien)
9	$1,41 - 1,6$	80% (tidak efisien)
10	$1,61 - 1,8$	78% (tidak efisien)
11	$> 1,81$	75% (tidak efisien)

Perhitungan efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan pada rasio antara capaian output (IKU) dan input (anggaran yang dikeluarkan).

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai Besar POM di Mataram Triwulan II tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3. 32 Tingkat Efisiensi Kegiatan Realisasi TW II terhadap Pagu Tahunan

No	Rincian Output		Output (%)	Input (%)	IE	TE	Capaian TE (%)	KESIMPULAN
1	AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	42.86	3.85	11.12	10.12	75 %	Tidak Efisien
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	115.45	3.19	36.20	35.20	75 %	Tidak Efisien
3	BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	557.07	87.86	6.34	5.34	75 %	Tidak Efisien
4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0.00	5.46	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
5	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	42.86	6.28	6.83	5.83	75 %	Tidak Efisien
6	CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0.00	0.00	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
7	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0.00	0.00	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

No	Rincian Output		Output (%)	Input (%)	IE	TE	Capaian TE (%)	KESIMPULAN
8	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0.00	31.36	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
9	QCD.U52	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MATARAM	83.33	16.53	5.04	4.04	75 %	Tidak Efisien
10	QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0.00	5.55	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
11	QDB.002	Desa Pangan Aman	0.00	10.55	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
12	QDB.003	Pasar Pangan aman berbasis komunitas	0.00	6.87	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
13	QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	100.00	8.21	12.19	11.19	75 %	Tidak Efisien
14	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	23.33	9.42	2.48	1.48	80 %	Tidak Efisien
15	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	43.05	8.81	4.89	3.89	75 %	Tidak Efisien
16	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	42.74	46.98	0.91	-0.09	75 %	Tidak Efisien
17	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	52.17	18.66	2.80	1.80	78 %	Tidak Efisien
18	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang Diperiksa oleh UPT	60.00	35.03	1.71	0.71	90 %	Efisien
19	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	54.11	19.09	2.83	1.83	75 %	Tidak Efisien
20	RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0.00	91.05	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
21	EBA.956	Layanan BMN	0.00	38.09	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
22	EBA.994	Layanan Perkantoran	0.00	42.64	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
TOTAL			60.85	45.42	1.34	0.34	95 %	Efisien

Sampai Triwulan II tahun 2025 BBPOM di Mataram melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 25 indikator kinerja dan 9 sasaran kegiatan. Dari 22 kegiatan (RO) terdapat 9 RO yang belum terdapat realisasinya terdiri dari 8 RO yang ditargetkan realisasinya akan diperoleh di akhir tahun dan 1 RO (QIC.003) yang ditargetkan realisasinya di Triwulan III 2025, sehingga kesembilan

kegiatan tersebut tidak diukur efisiensinya. Dari 11 kegiatan utama (Rincian Output) yang diukur efisiensinya, diperoleh 1 RO efisien dan 10 RO tidak efisien (walaupun seluruhnya mempunyai indeks efisiensi (IE)>1) dengan % capaian Tingkat efisiensi (TE) tertinggi 90% dan terendah sebesar 75%. Adanya kegiatan/Rincian Output yang tidak efisien disebabkan antara lain karena relative rendahnya persentase realisasi/capaian anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja masing-masing RO yang sudah cukup tinggi karena adanya blokir anggaran.

Tabel 3. 33 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran kegiatan berdasarkan Target Indikator yang ditetapkan Triwulan II dan realisasi pada Triwulan II

No	Sasaran Kegiatan	Output (%)	Input (%)	IE	TE	Capaian TE (%)	KESIMPULAN
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	73.55	51.28	1.43	0.43	92 %	Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100.00	84.28	1.19	0.19	100 %	Efisien
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105.35	85.80	1.23	0.23	95 %	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	103.17	88.25	1.17	0.17	100 %	Efisien
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100.00	18.55	5.39	4.39	75 %	Tidak Efisien
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	121.20	50.96	2.38	1.38	84 %	Tidak Efisien
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00	11.75	8.51	7.51	75 %	Tidak Efisien
8	Layanan Publik UPT yang prima	0.00	10.48	0.00	-1.00	75 %	Tidak dapat diukur
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	0.00	75.05	0.00	-1.00	75 %	Tidak dapat diukur
TOTAL		78.14	76.70	1.02	0.02	100 %	Efisien

Pada Triwulan II tahun 2025 BBPOM di Mataram melaksanakan 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan hasil 4 (Empat) Sasaran kegiatan **Efisien**, dan 5 (lima) sasaran kegiatan **Tidak Efisien**. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 hingga 7,51 dengan persen capaian TE bervariasi antara 75% hingga 100%.

Secara keseluruhan penggunaan anggaran BBPOM di Mataram sampai Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan hasil efisien dengan nilai tingkat efisiensi (TE) 0,02 dengan persentase Tingkat Efisiensi (%TE) sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sumber daya (dana) yang ada, sampai Triwulan II tahun 2025 BBPOM di Mataram mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran masing-masing sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a) Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan pertama “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah UPT” sebesar 0,43 dengan persen capaian Tingkat efisiensi sebesar 92% dengan Kesimpulan efisien. Hal ini disebabkan karena anggaran yang digunakan telah optimal dalam pencapaian *output* yang dihasilkan. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling, pemeriksaan dan pengujian Sediaan Farmasi berisiko dan Pangan Olahan berisiko beserta sarana penunjangnya.
- b) Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan kedua “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” Sebesar 0,19 dengan persen capaian Tingkat efisiensi sebesar 100% dengan kesimpulan Efisien.
- c) Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan ketiga “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”, sebesar 0,23 dengan persen capaian Tingkat efisiensi sebesar 95% dengan Kesimpulan efisien.
- d) Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”, sebesar 0,17 dengan persen capaian Tingkat efisiensi sebesar 100% dengan Kesimpulan efisien. Hal ini disebabkan karena anggaran yang digunakan telah optimal dalam pencapaian *output* yang

dihasilkan. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat dan pelaksanaan intervensi komunitas sekolah, desa dan pasar.

- e) Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan kelima "Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu", sebesar 4,39 dengan persen capaian Tingkat efisiensi sebesar 75% dengan Kesimpulan tidak efisien. Hal ini disebabkan karena capaian *output* yang dihasilkan sangat tinggi dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan, hal ini terjadi dikarenakan adanya Pemenuhan Blokir Efisiensi Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan TA 2025 pada periode Triwulan II. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan sarana dalam rangka pendampingan UMKM untuk memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengawasan pengaduan, pendampingan UMKM (Gemilang Pro UMKM). Kegiatan-kegiatan tersebut belum cukup memberikan dampak terhadap peningkatan pendampingan UMKM ditunjukkan dengan belum tercapainya target indikator maupun sasaran kegiatan.
- f) Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan keenam yaitu "Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Mataram", sebesar 1,38 dengan persen capaian Tingkat efisiensi sebesar 84% dengan Kesimpulan tidak efisien. Hal ini disebabkan karena capaian *output* yang dihasilkan sangat tinggi dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan, hal ini terjadi dikarenakan adanya Pemenuhan Blokir Efisiensi Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan TA 2025 pada periode Triwulan II. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan kompetensi penyidik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator dan sasaran kegiatan.
- g) Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu "Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja

BBPOM di Mataram”, sebesar 7,51 dengan persen capaian Tingkat efisiensi sebesar 75% dengan Kesimpulan tidak efisien. Hal ini disebabkan karena capaian *output* yang dihasilkan sangat tinggi dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan, hal ini terjadi dikarenakan adanya Pemenuhan Blokir Efisiensi Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan TA 2025 pada periode Triwulan II. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Analisis Penelusuran Siber berupa Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber), dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indicator dan sasaran.

- h) Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan kedelapan “Layanan Publik UPT yang Prima”, tidak dapat diukur karena belum terdapat capaian kinerja terhadap anggaran yang dikeluarkan. Realisasi kinerja sasaran ini ditargetkan diukur pada akhir tahun. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Pelayanan publik antara lain pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi maupun penerbitan rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.
- i) Tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan kesembilan “Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal”, tidak dapat diukur karena belum terdapat capaian kinerja terhadap anggaran yang dikeluarkan. Realisasi kinerja sasaran ini ditargetkan diukur pada akhir tahun. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran dengan proporsi terbesar dibandingkan anggaran pada sasaran lainnya. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan dalam rangka RB, penyusunan lapkin, laptah, renstra, dan rapat evaluasi, serta pelaksanaan Manajemen Risiko UPT BPOM.

BAB IV. PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis 2025-2029. Evaluasi interim Triwulan II tahun 2025 didasarkan pada Perjanjian Kerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kerja Tahun 2025 yang mengacu pada Draft Renstra dan Reviu Renstra BBPOM di Mataram Tahun 2025-2029. Terdapat 22 kegiatan utama (RO) untuk menunjang pencapaian 9 sasaran kegiatan dan 25 indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Di Triwulan II tahun 2025 hanya 7 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja yang diukur capaiannya.

Dari 7 sasaran kegiatan yang diukur capaiannya di Triwulan II tahun 2025 diperoleh 4 sasaran kegiatan dengan kategori “sangat baik”, dan 3 sasaran kegiatan dengan kategori “baik”. Nilai Kinerja Organisasi atau Nilai Pencapaian Sasaran kegiatan (NPSS) diperoleh sebesar 105,30% dengan predikat “ISTIMEWA”.

Hasil capaian tiap sasaran kegiatan di Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Nilai Sasaran Kegiatan pada Sasaran Kegiatan pertama “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar 105,30% dengan kategori SANGAT BAIK, menunjukkan BBPOM di Mataram sangat efektif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya;
- Capaian indikator Sasaran Kegiatan kedua “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” sebesar 100,0% dengan kategori BAIK, menunjukkan BBPOM di Mataram berhasil dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang efektif di wilayah kerjanya.
- Nilai Sasaran Kegiatan pada Sasaran Kegiatan ketiga “Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar 105,35% dengan kategori SANGAT BAIK, menunjukkan BBPOM di Mataram sangat efektif dalam penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya;
- Nilai Sasaran Kegiatan pada Sasaran Kegiatan keempat “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” sebesar 102,05% dengan kategori SANGAT BAIK

- menunjukkan BBPOM di Mataram sangat efektif dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) di wilayah kerjanya;
- Nilai Sasaran Kegiatan pada Sasaran Kegiatan kelima “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” sebesar 100% dengan kategori BAIK menunjukkan BBPOM di Mataram efektif dalam meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu;
 - Nilai Sasaran Kegiatan pada Sasaran Kegiatan keenam “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” sebesar 110% dengan kategori SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan keberhasilan BBPOM di Mataram dalam melaksanakan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerjanya;
 - Capaian indikator Sasaran Kegiatan ketujuh “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” sebesar 100,0% dengan kategori BAIK, menunjukkan BBPOM di Mataram berhasil dalam melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerjanya.

Untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan di Triwulan II tahun 2025 dilakukan pengukuran terhadap 19 indikator kinerja (IKSK) dari 7 sasaran kegiatan. Terdapat 8 indikator yang capaiannya dengan kategori “sangat baik”, dan 5 indikator dengan kategori “baik”, serta 6 indikator dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Mataram di Triwulan II tahun 2025 antara 100,00% sampai dengan 130,57%. Capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, BBPOM di Mataram didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 DIPA awal sebesar Rp. 20,815,994,000, bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2025 nomor SP DIPA- 063.01.2.432960/2025 tanggal 2 Desember 2024. Pada Triwulan II tahun 2025 dilakukan efisiensi/blokir anggaran sebesar Rp.3.594.713.000 atau sebesar 17,39% dari total

anggaran. Anggaran yang diblokir berasal dari jenis belanja barang (16,06% dari belanja barang) dan belanja modal (1,20% dari belanja modal).

Realisasi anggaran di Triwulan II tahun 2025 adalah Rp. 9.455.099.519 atau sebesar 45,42% terhadap seluruh pagu anggaran atau 54,90% terhadap pagu anggaran dikurangi blokir. Sumbangan terbesar terhadap realisasi anggaran ini yaitu realisasi belanja modal (91,07%) dan belanja pegawai (52,26%).

Secara keseluruhan penggunaan anggaran BBPOM di Mataram di Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan hasil efisien dengan nilai indeks efisiensi (IE) 1,02 dan tingkat efisiensi (TE) 0,02 serta capaian tingkat efisiensi sebesar 100% dengan Kesimpulan efektif. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis secara umum telah efektif dan berdampak untuk pencapaian indikator maupun sasaran kegiatan.

IV.2. Saran

Hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan dan capaian kinerja di Triwulan II tahun 2025 agar digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya, serta hasil evaluasi di Triwulan II tahun 2025 ditindaklanjuti dan dimonitor pencapaiannya secara berkala, khususnya pada indikator yang persentase capaiannya > 110% di Triwulan II tahun 2025, agar seluruh target indikator kinerja di triwulan berikutnya dapat tercapai dengan kategori “BAIK atau SANGAT BAIK”.

LAMPIRAN**1. PERJANJIAN KINERJA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MATARAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOSEF DWI IRWAN PRAKASA
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Mataram

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

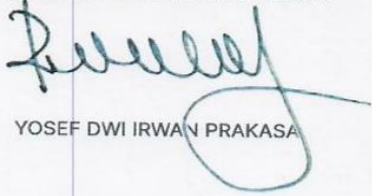
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Mataram



YOSEF DWI IRWAN PRAKASA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

Lampiran PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI MATARAM			
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,5 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98,8 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,2 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81,7 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,57 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13 Nilai

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Persentase
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Persentase
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87,3 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.9 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.05 Nilai

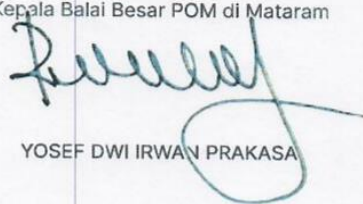
Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 20.815.994.000 (Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	10.807.869.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10.008.125.000

Mataram, 12 February 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Besar POM di Mataram



YOSEF DWI IRWAN PRAKASA

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) REVISI



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MATARAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	694.660.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	45.700.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	212.130.375
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	212.130.375
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	141.420.250

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		7	10	20	25	35	50	60	70	80	90	98.8	16.207.500
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	16.207.500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	16.207.500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	291.005.500
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	291.005.500

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.2	84.2	84.2	84.2	84.2	84.2	84.2	84.2	84.2	84.2	84.2	84.2	16.207.500
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				37.5	37.5	37.5	37.5	62.5	62.5	62.5	63	63	7.651.000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			81	81	81	81.25	81.25	81.25	81.5	81.5	81.5	81.7	5.055.530.000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			88.57	88.57	88.57	88.57	88.57	88.57	88.57	88.57	88.57	88.57	238.478.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			5	25	49	49	54	63	75	88	100	13	562.510.000

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Jumlah desa pangan aman			5	25	37	47	57	70	80	80	100	4	665.544.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			5	25	70	70	80	80	100	100	100	1	150.255.000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		10	15	25	45	55	60	65	75	80	90	87,3	93.032.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		2.5	9.1	9.17	14.17	27.5	35	46.67	49.17	58.33	65.83	92	735.132.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	4.16	8.33	12.5	50	50	50	50	50	50	50	50	90	152.822.000

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	efektif di wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	126.033.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	2.769.031.250
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83.9	2.769.031.250
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	2.769.031.250
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3.05	2.769.031.250
Total														20.815.994.000	

Mataram, 30 June 2025

Kepala Balai Besar POM di Mataram


YOSEF DWI IRWAN PRAKASA

3. RENCANA KERJA TAHUNAN



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

NOMOR HK.02.02.14A.09.24.191 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2025;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

- 2 -

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI MATARAM,



YOSEF DWI IRWAN

- 4 -

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR****PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM****NOMOR HK.02.02.14A.09.24.191 TAHUN 2024****TENTANG****RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI MATARAM TAHUN 2025****RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
MATARAM TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

- 5 -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81,7
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	97,90
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	13
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	94
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100

LAPORAN KINERJABBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2025

- 6 -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88,10
		Nilai AKIP UPT BPOM	83,9
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89,0
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan II Tahun 2024

4. Capaian Output (Rincian Output) Kegiatan dan Realisasi Anggaran Triwulan II 2025

No.	Program/Kegiatan/Output		Volume			Anggaran		
			Target 2025	Realisasi	Capaian/Progress (%)	Pagu awal (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b		c	d	e= (d/c*100)	f	g	h= (g/f*100)
1	AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	6	42,86	152.822.000	5.890.000	3,85
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	466	538	115,45	126.033.000	4.020.000	3,18
3	BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	368	2050	557,07	752.411.000	661.087.180	87,86
4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0,00	818.000.000	44.698.093	5,46
5	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	35	15	42,86	96.067.000	6.030.000	6,27
6	CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0,00	150.000.000	0	0
7	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	0	0,00	100.000.000	0	0
8	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0,00	1.335.853.000	418.960.902	31,36
9	QCD.U52	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MATARAM	6	5	83,33	735.132.000	121.483.720	16,52
10	QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	13	0	0,00	262.510.000	14.580.000	5,55
11	QDB.002	Desa Pangan Aman	4	0	0,00	355.544.000	37.512.000	10,55
12	QDB.003	Pasar Pangan aman berbasis komunitas	1	0	0,00	150.255.000	10.327.000	6,87
13	QDC 001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00	45.700.000	3.750.000	8,20
14	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh	30	7	23,33	93.032.000	8.760.000	9,41

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Ouput		Volume			Anggaran		
			Target 2025	Realisasi	Capaian/ Progress (%)	Pagu awal (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b		c	d	e= (d/c*100)	f	g	h= (g/f*100)
		UPT						
15	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	446	192,00	43,05	565.681.000	49.813.719	8,80
16	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	992	424,00	42,74	694.660.000	326.320.530	46,97
17	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh UPT	46	24,00	52,17	64.830.000	12.097.000	18,65
18	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang Diperiksaoleh UPT	5	3	60,00	7.651.000	2.680.000	35,02
19	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	353	191	54,11	582.011.000	111.086.700	19,08
20	RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0,00	3.642.484.000	3.316.475.118	91,04
21	EBA 956	Layanan BMN	1	0	0,00	8.000.000	3.046.804	38,08
22	EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0	0,00	10.077.318.000	4.296.480.753	42,63

5. Nilai Efisiensi masing-masing indikator kinerja dan Sasaran Kegiatan Triwulan II 2025

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	KESIMPULAN
		T	R	%	T	R	%				
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			73.55	981,037,951	503,067,950	51.28	1.43	0.43	92 %	Efisien
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5	95.54	110.45	346931500	326320530	94.06	1.17	0.17	100 %	Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO			0.00	24369000	3750000	15.39	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	97.08	114.21	144111544	18680145	12.96	8.81	7.81	75 %	Tidak Efisien
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	0.00	144111544	18680145	12.96	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	96074363	12453430	12.96	9.08	8.08	75 %	Tidak Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	35	36.67	104.77	3841250	3024250	78.73	1.33	0.33	95 %	Efisien
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	3841250	3024250	78.73	1.40	0.40	95 %	Efisien

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	KESIMPULAN
		T	R	%	T	R	%				
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.33	0.00	3841250	3024250	78.73	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96	98.62	0.00	105037500	55543350	52.88	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	97.92	130.56	105037500	55543350	52.88	2.47	1.47	80 %	Tidak Efisien
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.2	102.28	121.47	3841250	3024250	78.73	1.54	0.54	92 %	Efisien
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi				100.00	3,180,000	2,680,000	84.28	1.19	0.19	100 %	Efisien
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	37.5	37.5	100.00	3180000	2680000	84.28	1.19	0.19	100 %	Efisien
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT				105.35	4,353,473,500	3,735,436,020	85.80	1.23	0.23	95 %	Efisien
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.25	85.6	105.35	4353473500	3735436020	85.80	1.23	0.23	95 %	Efisien
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT				103.17	826,658,400	729,536,180	88.25	1.17	0.17	100 %	Efisien

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	KESIMPULAN
		T	R	%	T	R	%				
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.57	94.48	106.67	80325400	667117180	830.52	0.13	-0.87	75 %	Tidak Efisien
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	49	49.23	100.47	303297000	14580000	4.81	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
16	Jumlah desa pangan aman	45	47.5	105.56	354104000	37512000	10.59	9.96	8.96	75 %	Tidak Efisien
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100.00	88932000	10327000	11.61	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu				100.00	47,230,000	8,760,000	18.55	5.39	4.39	75 %	Tidak Efisien
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	55	55	100.00	47230000	8760000	18.55	5.39	4.39	75 %	Tidak Efisien
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT				121.20	238,376,000	121,483,720	50.96	2.38	1.38	84 %	Tidak Efisien
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	27.5	33.33	121.20	238376000	121483720	50.96	2.38	1.38	84 %	Tidak Efisien
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT				100.00	50,116,000	5,890,000	11.75	8.51	7.51	75 %	Tidak Efisien

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	KESIMPULAN
		T	R	%	T	R	%				
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	50116000	5890000	11.75	8.51	7.51	75 %	Tidak Efisien
Layanan Publik UPT yang prima				0.00	38,353,000	4,020,000	10.48	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	0.00	38353000	4020000	10.48	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal				0.00	5,788,389,980	4,344,225,652	75.05	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	0.00	1447097495	1086056413	75.05	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
23	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	0.00	1447097495	1086056413	75.05	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	0.00	1447097495	1086056413	75.05	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	0.00	1447097495	1086056413	75.05	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
TOTAL				78.14	12,326,814,831	9,455,099,522	76.70	1.02	0.02	100 %	Efisien

6. Nilai Efisiensi masing-masing Kegiatan/Rincian Output (RO) Triwulan II 2025

No	KRO	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	KESIMPULAN
		T	R	%	T	R	%				
1	AEA.001	14	6	42.86	152,822,000	5890000	3.85	11.12	10.12	75 %	Tidak Efisien
2	BAH.001	466	538	115.45	126,033,000	4,020,000	3.19	36.20	35.20	75 %	Tidak Efisien
3	BDC.001	368	2050	557.07	752,411,000	661,087,180	87.86	6.34	5.34	75 %	Tidak Efisien
4	BKB.001	1	0	0.00	818,000,000	44,698,093	5.46	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
5	BMB.001	35	15	42.86	96,067,000	6,030,000	6.28	6.83	5.83	75 %	Tidak Efisien
6	CAB.002	1	0	0.00	150,000,000	-	0.00	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
7	CAN.001	8	0	0.00	100,000,000	-	0.00	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
8	PDD.001	1	0	0.00	1,335,853,000	418,960,902	31.36	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
9	QCD.U52	6	5	83.33	735,132,000	121,483,720	16.53	5.04	4.04	75 %	Tidak Efisien
10	QDB.001	13	0	0.00	262,510,000	14,580,000	5.55	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
11	QDB.002	4	0	0.00	355,544,000	37,512,000	10.55	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
12	QDB.003	1	0	0.00	150,255,000	10,327,000	6.87	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien

7. NILAI SASARAN KEGIATAN (NSS) DAN NILAI PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI (NKO) TW 2 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN KOREKSI	NILAI SASARAN KEGIATAN
Nilai Kinerja Organisasi						105.30%	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.50	95.54	110.46%	110.00%	105.30%
		Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	97.08	114.21%	110.00%	
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	100.00	100.00%	100.00%	
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65%	110.00%	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	35.00	36.67	104.76%	104.76%	
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	109.89%	
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	93.33	109.80%	109.80%	
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.00	98.62	102.73%	102.73%	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	97.92	130.57%	110.00%	
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.20	102.28	121.47%	110.00%	

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN KOREKSI	NILAI SASARAN KEGIATAN
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	37.50	37.50	100.00%	100.00%	100.00%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.25	85.60	105.35%	105.35%	105.35%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.57	94.48	106.67%	106.67%	102,05%
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	49.00	49.23	100.47%	100.47%	
		Jumlah desa pangan aman	47.00	47.50	101.06%	101.06%	
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70.00	70.00	100.00%	100.00%	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	55.00	55.00	100.00%	100.00%	100.00%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	27.50	33.33	121.21%	110.00%	110.00%
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00%	100.00%	100.00%
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN KOREKSI	NILAI SASARAN KEGIATAN
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-
		Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2025

8. KERTAS KERJA REALISASI MASING-MASING INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang	Januari	53,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang	Februari	81,00		100,00	94,12	95,83	97,66	96,90
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang	Maret	97,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang	April	279,00		100,00	92,11	97,62	95,78	96,38
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang	Mei	430,00		100,00	90,71	87,53	91,67	92,48
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang	Juni	570,00		100,00	94,23	94,29	93,66	95,54

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Kriteria	Realisasi (%)
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	Januari	7	85,00	50,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	Februari	16	85,00	73,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,62
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	Maret	23	85,00	94,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,80
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	April	61	85,00	75,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,03
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	Mei	108	85,00	80,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,13
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	Juni	161	85,00	85,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,08

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	85,00	76,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,29
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	85,00	82,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,53
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

6. Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
		Januari	0,00	16,67	0,00	8,33
	6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S					
		Februari	7,00	20,00	0,00	10,00
	6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S					
		Maret	10,00	23,53	0,00	11,76
	6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S					
	6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	April	20,00	32,00	16,67	24,33
	6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Mei	25,00	27,78	25,00	26,39
	6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Juni	35,00	33,33	40,00	36,67

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2025

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
	BBPOM di Mataram	9	Persentase sarana dist Januari		91,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
	BBPOM di Mataram	9	Persentase sarana dist Februari		91,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
	BBPOM di Mataram	9	Persentase sarana dist Maret		91,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
	BBPOM di Mataram	9	Persentase sarana dist April		91,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
	BBPOM di Mataram	9	Persentase sarana dist Mei		91,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
	BBPOM di Mataram	9	Persentase sarana dist Juni		91,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	epatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
	BBPOM di Mataram	8	Persentase Sarana Pro Januari		100,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	BBPOM di Mataram	8	Persentase Sarana Pro Februari		100,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	BBPOM di Mataram	8	Persentase Sarana Pro Maret		100,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	BBPOM di Mataram	8	Persentase Sarana Pro April		100,00	9,00	9,00	100,00	92,59
	BBPOM di Mataram	8	Persentase Sarana Pro Mei		100,00	13,00	13,00	100,00	94,87
	BBPOM di Mataram	8	Persentase Sarana Pro Juni		90,00	20,00	20,00	100,00	93,33

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2025

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
	9 Persentase sarana dist Januari			100,00	100,00	100,00	94,44	98,61
	9 Persentase sarana dist Februari			100,00	100,00	100,00	96,67	99,17
	9 Persentase sarana dist Maret			100,00	100,00	100,00	96,77	99,19
	9 Persentase sarana dist April			97,06	100,00	100,00	97,30	98,59
	9 Persentase sarana dist Mei			98,08	100,00	100,00	97,78	98,96
	9 Persentase sarana dist Juni			96,43	100,00	100,00	98,04	98,62

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah Sarana yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
	10 Persentase sarana distribusi Januari		5	5	70,00	5	5	10,00	100,00
	10 Persentase sarana distribusi Februari		23	23	70,00	23	23	10,00	100,00
	10 Persentase sarana distribusi Maret		50	50	70,00	50	50	10,00	100,00
	10 Persentase sarana distribusi April		56	56	70,00	56	56	10,00	100,00
	10 Persentase sarana distribusi Mei		65	65	70,00	65	65	10,00	100,97
	10 Persentase sarana distribusi Juni		68	71	67,04	71	71	10,00	97,92

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2025

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
14A	Balai Besar POM di Banda Mataram	11	Persentase Iklan Januari			120,00	100,00	100,00	100,00	96,82	103,36
14A	Balai Besar POM di Banda Mataram	11	Persentase Iklan Februari			100,00	100,00	104,17	100,00	99,55	100,74
14A	Balai Besar POM di Banda Mataram	11	Persentase Iklan Maret			100,00	100,00	100,00	100,00	99,78	99,96
14A	Balai Besar POM di Banda Mataram	11	Persentase Iklan April			100,00	100,00	98,10	94,87	100,00	98,59
14A	Balai Besar POM di Banda Mataram	11	Persentase Iklan Mei			100,00	100,00	113,64	97,78	99,96	102,27
14A	Balai Besar POM di Banda Mataram	11	Persentase Iklan Juni			100,00	100,00	112,18	101,85	97,35	102,28

12. Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
12	Persentase Caki Januari		0	0	8	0,00
12	Persentase Caki Februari		0	0	8	0,00
12	Persentase Caki Maret		0	0	8	0,00
12	Persentase Caki April		3	3	8	37,50
12	Persentase Caki Mei		3	3	8	37,50
12	Persentase Caki Juni		3	3	8	37,50

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2025

IKU 13. Nilai pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Monev SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 Triwulan 2 Tahun 2025.

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 2 (%)	Target Nilai SKL TW 2 (%)	Capaian thd Target TW 2 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi				
1	BBPOM di Banda Aceh	73	83.8	80.2	50	46.5	72.6	71.5	101.5	99.4
2	BBPOM di Padang	77	83.6	87.6	100	22.3	81.6	76.8	106.2	106.0
3	Balai POM di Batam	67.3	82.1	82.3	30	26.9	66.2	64.4	102.8	98.4
4	Balai POM di Bengkulu	71.1	79.0	91.8	70	21.2	74	70.5	104.9	104.0
5	BBPOM di Bandar Lampung	77.2	79.0	81.1	80	46	76.3	76.2	100.1	98.8
6	BBPOM di Palembang	64.8	78.2	82.1	50	26.6	68.2	63	108.2	105.2
7	Balai POM di Jambi	59.1	79.1	86.4	20	17.5	62.6	58.3	107.4	105.9
8	Balai POM di Pangkalpinang	73.7	82.2	86.6	70	31	75.5	73.1	103.3	102.5
9	BBPOM di Bandung	81.7	85.3	88.2	80	67.2	83	80	103.7	101.6
10	BBPOM di Jakarta	72.8	82.3	85.9	50	72.8	75.6	69.9	108.1	103.8

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 2 (%)	Target Nilai SKL TW 2 (%)	Capaian thd Target TW 2 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi				
11	BBPOM di Serang	71.5	85.4	92.2	50	28.1	73.9	68.7	107.6	103.4
12	BBPOM di Yogyakarta	77.5	83.5	92.1	80	44.6	80.6	77.2	104.4	104.0
13	BBPOM di Denpasar	81.4	81.3	85.8	100	55.8	83.4	80.9	103.0	102.4
14	BBPOM di Mataram	81.7	86.8	93.9	90	53.9	85.6	81.25	105.3	104.7
15	BBPOM di Kupang	70.2	76.5	87.9	70	40.1	73.8	68.8	107.3	105.2
16	BBPOM di Banjar Baru	71.5	71.7	76.6	50	14.8	62.7	57.91	108.2	87.6
17	BBPOM di Palangkaraya	72.5	78.1	78.6	90	25	75.3	71	106.0	103.8
18	BBPOM di Pontianak	73.4	79.5	91.1	60	24.3	72.4	72.1	100.4	98.6
19	Balai POM di Tarakan	39.1	37.1	34.8	40	4.8	34	32	106.2	86.9
20	Balai POM di Gorontalo	65.1	82.4	71.8	50	25.7	68.1	64.7	105.3	104.6
21	Balai POM di Palu	77.0	83.4	87.3	70	50	78.2	75.73	103.2	101.5
22	Balai POM di Sofifi	45.8	51.4	54.8	80	11.5	53.8	40	134.5	117.5
23	Balai POM di Ambon	73.9	81.2	72.1	70	43.5	73.4	71.85	102.2	99.3
24	Balai POM di Kendari	74.5	83.0	89.3	70	53.2	78.7	72	109.3	105.6
25	Balai POM di Mamuju	49.6	59.2	57.9	60	4	53.6	49.2	108.9	108.0
26	BBPOM di Jayapura	70	72.7	83.9	60	37.8	68.9	65.9	104.5	98.4
27	Balai POM di Manokwari	64.1	64.8	72.2	100	11.8	68	61.8	110.0	106.1
	Rata-rata	69.5	76.7	80.5	66.3	33.6	71.1		106.4	102.3

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2025

IKU 14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT

Indeks Efektivitas KIE													
No	Komponen	Januari		sd Pebruari		sd Maret		sd April		sd Mei		sd Juni	
		Skala 4	Skala 100	Skala 4	Skala 100	Skala 4	Skala 100	Skala 4	Skala 100	Skala 4	Skala 100	Skala 4	Skala 100
1	Survey Tatap Muka												
	- Narasumber/Petugas					4	100	3,988	99,689	3,991	99,773	3,991	99,773
	- Konten/Informasi					4	100	3,981	99,534	3,986	99,659	3,986	99,659
	- Pemahaman Audiens					4	100	3,891	97,283	3,891	97,273	3,891	97,273
	- Manfaat					4	100	3,975	99,379	3,982	99,546	3,982	99,546
	Indeks Tatap Muka	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4	100	3,95875	98,97125	3,9625	99,06275	3,9625	99,06275
	Jumlah Responden					21		161		220		220	
2	Survey Media												
	- Sumber Informasi					3,779	94,477	3,779	94,477	3,779	94,477	3,779	94,477
	- Konten/Informasi					3,721	93,023	3,721	93,023	3,721	93,023	3,721	93,023
	- Pemahaman Audiens					3,349	83,721	3,349	83,721	3,349	83,721	3,349	83,721
	- Manfaat					3,535	88,372	3,535	88,372	3,535	88,372	3,535	88,372
	Indeks Media	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3,596	89,89825	3,535	89,89825	3,535	89,89825	3,596	89,89825
	Jumlah Responden					43		43		43		43	
	Total Responden	0		0		64		204		263		263	
	Indeks Rata-rata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3,798	94,95	3,75	94,43	3,75	94,48	3,78	94,48
	Target Indeks		88,57		88,57		88,57		88,57		88,57		88,57
	%Capaian		#DIV/0!		#DIV/0!		107,20		106,62		106,67		106,67

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2025

15. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program	Sosialisasi Keamanan Pangan	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah	Pengawasan	Realisasi
1000	Balai POM di Mataram	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembt Januari		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Balai POM di Mataram	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembt Februari		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Balai POM di Mataram	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembt Maret		5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1000	Balai POM di Mataram	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembt April		25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1000	Balai POM di Mataram	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembt Mei		45	25,00	10,77	13,46	0,00	0,00	49,23
1000	Balai POM di Mataram	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembt Juni		65	25,00	10,77	13,46	0,00	0,00	49,23

16. Jumlah Desa Pangan Aman

Kode Unit	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi
1000	Balai Besar POM di Banda Matara	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari							0,00
1000	Balai Besar POM di Banda Matara	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari							0,00
1000	Balai Besar POM di Banda Matara	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	5	5,00					5,00
1000	Balai Besar POM di Banda Matara	16	Jumlah Desa Pangan Aman	April	25	25,00					25,00
1000	Balai Besar POM di Banda Matara	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	45	25,00	12,50	5,00			42,50
1000	Balai Besar POM di Banda Matara	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	75	25,00	12,50	10,00			47,50

17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 2025

Kode Unit	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi	Bimtek dan	Sosialisasi	Pengawasan	Pengawasan	Realisasi
100	Balai POM di Mataram	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komu Januari		0						0,00
100	Balai POM di Mataram	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komu Februari		0						0,00
100	Balai POM di Mataram	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komu Maret		5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
100	Balai POM di Mataram	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komu April		25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
100	Balai POM di Mataram	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komu Mei		50	25,00	25,00	20,00	0,00	0,00	70,00
100	Balai POM di Mataram	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komu Juni		50	25,00	25,00	20,00	0,00	0,00	70,00

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2025

18. Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan_atau IP-CPPOB

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
14A	BBPOM di Mataram	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	0	5,00	0,00	0,00	5,00
14A	BBPOM di Mataram	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Februari	10	5,00	0,00	0,00	5,00
14A	BBPOM di Mataram	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Maret	15	15,00	10,00	10,00	11,67
14A	BBPOM di Mataram	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	April	25	25,00	10,00	40,00	25,00
14A	BBPOM di Mataram	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Mei	45	60,00	30,00	55,00	48,33
14A	BBPOM di Mataram	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juni	55	65,00	40,00	60,00	55,00

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasi lan Perkara
19	Persentase Kebe	Januari	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19	Persentase Kebe	Februari	6	0	1	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,50
19	Persentase Kebe	Maret	6	0	0	0	0	1	0	0,55	0	0	0	0	0	0	9,17
19	Persentase Kebe	April	6	0		0	0	1	0	0,55		0	0		0	0	9,17
19	Persentase Kebe	Mei	6		2	0	0,3	1	0	0,55		0	0			0	14,17
19	Persentase Kebe	Juni	6		3	0	0,45	1	0	0,55		0	0	1		1	33,33